



**PERSPEKTIF *FRAUD DIAMOND* TERHADAP
KECENDERONGAN KECURANGAN DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Kecamatan Ambulu)**

SKRIPSI

Oleh

Wasilah Agustina

NIM 160810301054

PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2019



**PERSPEKTIF *FRAUD DIAMOND* TERHADAP
KECENDERONGAN KECURANGAN DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Kecamatan Ambulu)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar

Sarjana Ekonomi

Oleh

Wasilah Agustina

NIM 160810301054

PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2019

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala Puji hanya bagi-Nya atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan. Dengan penuh rasa syukur, saya mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang saya sayangi Alm. Bapak Imam Sudjono dan Almh. Ibu Siti Habsah;
2. Kakak-kakak saya tercinta Isti Qomariah, Ahmad Yani, Andi Rahmansyah, Ellisa Imam Qomeriah, dan Desi Puspitasari;
3. Keluarga Besar saya yang telah mencurahkan doa dan segenap kasih sayang;
4. Seluruh guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi;
5. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya”

(QS. Ar-Ra'd : 11)

“Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tapi jadilah orang yang bernilai”

(Albert Einstein)

“Jadilah manusia yang baik kepada sesama. karena sejatinya, hidup hanyalah tentang bagaimana cara kita membuatnya untuk lebih bermakna”

(Wasilah Agustina)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wasilah Agustina

NIM : 160810301054

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Perspektif Fraud Diamond terhadap Kecenderungan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa” (Studi Empiris : Pada Pemerintah Desa Kecamatan Ambulu) adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Oktober 2019

Yang Menyatakan

Wasilah Agustina

NIM 160810301054

SKRIPSI

**PERSPEKTIF *FRAUD DIAMOND* TERHADAP
KECENDERUNGAN KECURANGAN DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Kecamatan Ambulu)**

Oleh

Wasilah Agustina

NIM 160810301054

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Andriana, S.E., M.Sc., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Hendrawan Santosa P., S.E., M.Si., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PERSPEKTIF FRAUD DIAMOND TERHADAP
KECENDERUNGAN KECURANGAN DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI
EMPIRIS PADA PEMERINTAH DESA
KECAMATAN AMBULU)

Nama Mahasiswa : Wasilah Agustina

NIM : 160810301054

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 29 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Andriana, S.E., M.Sc., Ak.
NIP. 19820929 201012 2 002

Hendrawan Santosa Putra, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19740506 200212 1 006

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Agung Budi Sulistiyono, S.E., M.Si., Ak.
NIP 19780927 200112 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERSPEKTIF *FRAUD DIAMOND* TERHADAP
KECENDERUNGAN KECURANGAN DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Empiris pada Pemerintah Desa Kecamatan Ambulu)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wasilah Agustina

NIM : 160810301054

Jurusan : Akuntansi

Program Studi : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

2 Desember 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Agung Budi S., S.E., M.Si., Ak. (.....)
NIP 19780927 200112 1 002

Sekretaris : Dewi Ayu Puspita, S.E., M.SA., Ak. (.....)
NIP 19860216 201504 2 003

Anggota : Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA., Ak. (.....)
NIP 19820912 200604 2 002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.
NIP. 19710727 199512 1 001

*Perspektif Fraud Diamond Terhadap Kecenderungan Kecurangan dalam
Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa
Kecamatan Ambulu)*

Wasilah Agustina

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor pendorong terjadinya kecurangan berbasis teori berlian kecurangan yakni kepuasan kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal pemerintah, penegakan hukum, budaya organisasi, perilaku tidak etis dan kompetensi. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa di Kabupaten Jember tepatnya seluruh desa yang berada di Kecamatan Ambulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari metode regresi linier berganda, uji kelayakan mode (Uji F), koefisien determinasi, dan Uji Parsial (Uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum dan Budaya Organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan kepuasan kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal pemerintah, perilaku tidak etis, dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci : Teori Kecurangan Berlian, Pengelolaan Keuangan Desa, Kepuasan Kompensasi, Gaya Kepemimpinan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penegakan Hukum, Budaya Organisasi, Perilaku Tidak Etis, Kompetensi.

The Perspective Of Fraud Diamond in The Management Of Village Finance (Empirical Study Of The Village Government Of Ambulu District)

Wasilah Agustina

Accounting Department, Faculty of Economic and Business, Jember University

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of factors driving the occurrence of fraud based on fraud diamond theory that is compensation satisfaction, leadership style, the government's internal control system, law enforcement, organizational culture, unethical behavior and competence. This research was conducted on the village government level in Jember precisely the whole village in Ambulu District. Data collection techniques that used in this study is the primary data by questionnaires. Method of data analysis uses Descriptive Statistic, Data Quality Test, Classical Assumption Test, and Hypothesis Testing consisted of multiple linier regression method, model feasibility test (F test), coefficient of determination, and Partial Test (t test). The results showed that Law Enforcement and Organizational Culture influenced the tendency of fraud in village financial management. While Compensation Satisfaction, Leadership Style, Government's Internal Control System, Unethical Behavior, and Competence have no effect on fraud tendency in village financial management.

Keywords : *Fraud Diamond Theory, Village Financial Management, Compensation Satisfaction, Leadership Style, Government's Internal Control System, Law Enforcement, Organizational Culture, Unethical Behavior, Competence.*

RINGKASAN

Perspektif Fraud Diamond Terhadap Kecenderungan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Kecamatan Ambulu); Wasilah Agustina; 160810301054; 2019; 121 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Kecurangan (*Fraud*) merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain), dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori *Fraud Diamond*, dimana teori tersebut terdiri dari empat faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan (*fraud*) yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) dan kemampuan (*capability*). Pada penelitian kali ini kemampuan diproksikan dengan persepsi mengenai kompetensi, rasionalisasi diproksikan dengan budaya organisasi dan perilaku tidak etis, peluang diproksikan dengan sistem pengendalian internal pemerintah dan penegakan hukum, dan tekanan diproksikan dengan kepuasan kompensasi dan gaya kepemimpinan.

Salah satu jenis fraud yang paling sering terjadi yaitu Korupsi. Pada tahun 2018, *Transparency International Indonesia* (TII) menyebutkan bahwa skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia masih berada dibawah angka rata-rata CPI internasional yaitu sebesar 38. Selama rentang waktu 2004 hingga 2018 *Indonesia Corruption Watch* (ICW) memaparkan hasil pantauannya bahwa terdapat 104 kepala daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai kasus korupsi. Provinsi yang menduduki peringkat teratas dengan kategori kasus korupsi kepala daerah terbanyak di tahun 2018 jatuh kepada provinsi Jawa Timur.

Berbagai alasan sering digunakan oleh seseorang untuk membenarkan tindak korupsi. Alasan adanya ketidakadilan hingga perasaan yang tidak puas membuat seseorang melakukan kejahatan korupsi. Korupsi telah menjangar ke

berbagai lapisan, tidak hanya di pemerintah pusat, pemerintah desa pun telah terinfeksi dengan kasus korupsi. Besarnya dana desa yang diterima oleh masing-masing desa membuat aparat desa lebih leluasa untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 sudah tercatat 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka kasus korupsi yang telah menimbulkan kerugian negara sebanyak Rp. 40,6 Miliar. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih dan dikendalikan melalui struktur dan sistem sehingga penggunaan dana dapat digunakan untuk masyarakat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor pendorong terjadinya kecurangan berbasis berlian kecurangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang bekerja di Pemerintahan Desa Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang terdiri dari 7 Desa. Sampel yang dipilih dari setiap desa antara lain kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pemberdayaan masyarakat, kepala seksi pelayanan umum, kepala urusan umum tata usaha, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan perencanaan.

Data Penelitian ini diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner dengan memberikan secara langsung kepada responden, dimana peneliti memberikan 8 kuesioner pada 7 desa sehingga sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 56 kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan kepuasan kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal pemerintah, perilaku tidak etis dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

SUMMARY

The Perspective Of Fraud Diamond in The Management Of Village Finance (Empirical Study Of The Village Government Of Ambulu District; Wasilah Agustina; 160810301054; 2019; 121 pages; Accounting Department of Economics and Business Faculty of Jember University.

Fraud is an intentional unlawful act committed for a specific purpose (manipulation or giving false reports to other parties), carried out by people from within or outside the organization to gain personal or group benefits that directly or indirectly harm other parties. The theory that underlies this research is Terra Fraud Diamond, where the theory consists of four factors that influence a person to commit fraud, namely pressure, opportunity, rationalization and capability. In this study, ability is proxied by perceptions of competence, rationalization is proxied by organizational culture and unethical behavior, opportunities are proxied by the government's internal control system and law enforcement, and pressure is proxied by compensation satisfaction and leadership style.

One of the most common types of fraud is Corruption. In 2018, Transparency International Indonesia (TII) stated that the Corruption Perception Index (CPI) score of Indonesia was still below the international CPI average of 38. During the period of 2004 to 2018 the Indonesian Corruption Watch (ICW) explained the results of its monitoring that there were 104 regional heads in Indonesia have been identified as corruption cases. The province that was ranked top with the most regional head corruption cases in 2018 fell to the province of East Java.

Various reasons are often used by someone to justify acts of corruption. Reasons for injustice to feelings of dissatisfaction make someone commit a crime of corruption. Corruption has spread to various layers, not only in the central government, the village government has also been infected with corruption cases. The amount of village funds received by each village makes the village apparatus

more free to do things that can harm the country. Since 2015 to 2018 there have been 181 cases of corruption of village funds with 184 suspected corruption cases that have caused state losses of Rp. 40.6 Billion. This needs to get more attention and be controlled through structures and systems so that the use of funds can be used for rural communities.

This study aims to examine the effect of the factors driving the occurrence of diamond-based cheating. The population in this study were all village officials who worked in the Village Government of Ambulu District, Jember Regency which consisted of 7 villages. Samples selected from each village included the village head, village secretary, head of the government section, head of the community empowerment section, head of the public service section, head of public affairs administration, head of financial affairs, and head of planning affairs.

The research data was obtained by distributing questionnaires by giving directly to respondents, where researchers gave 8 questionnaires in 7 villages so that the samples taken in this study were 56 questionnaires. The results of this study indicate that law enforcement and organizational culture influence the tendency of fraud in village financial management. Whereas compensation satisfaction, leadership style, the government's internal control system, unethical behavior and competence did not influence the tendency of fraud in village financial management.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perspektif *Fraud Diamond* terhadap Kecenderungan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. (Studi Empiris pada Pemerintah Desa Kecamatan Ambulu)”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyono, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Andriana, S.E., M.Sc., Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu serta tenaga, dengan sabar memberikan masukan, semangat dan motivasi kepada penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Hendrawan Santosa Putra, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang selalu memberikan masukan kepada penulis dari awal penelitian hingga akhir penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Ahmad Ahsin Kusuma M, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan saran selama masa perkuliahan dan proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak., CTA, CPA selaku Dosen serta Ayah penulis di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang selalu memberikan semangat, saran, masukan dan motivasi selama penulis menempuh masa studi dan penyusunan skripsi hingga selesai;

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya pada jurusan S1 Akuntansi;
9. Kedua orang tua yang saya sayangi Alm. Bapak Imam Sudjono dan Almh. Ibu Siti Habsah yang sudah mendidik dan merawat saya dengan sepenuh hati, penuh kesabaran dan kasih sayang;
10. Kakak-kakak saya tercinta Isti Qomariah, Ali Maksom, Ahmad Yani, Mia Heni Windiarti, Andi Rahmansyah, Krisna Rini, Ellisa Imam Qomeriah, Fendi Firmansyah, Desi Puspitasari, Muhammad Jufri, Mayang Almatya Damayanti dan para ponakan yang turut mendukung, memberikan perhatian, semangat dan doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi ini;
11. Keluarga Besar saya yang selalu memberikan semangat dan doa;
12. Perangkat Desa Kecamatan Ambulu, terutama Bapak Drs. Sutarman, M.Si., selaku Camat Ambulu yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian;
13. Keluarga Besar Program Studi S1 Akuntansi Angkatan 2016;
14. Sahabat penulis sejak menjadi Mahasiswa Baru, Saudara Sepipi, Ade Fisma Hanny Sulaiman, Aulia Citra Permatasari, Rifdah Atikah dan Kakak Eka Agusdina yang selalu memberikan semangat dan cinta;
15. Sahabat dan kakak-kakak Kos, Nadya Yusril, Qurrotul Khayun, Novita Anggraini, dan Bella Ramadhani.
16. Sahabat dan teman berkeluh kesah, Dwima Nadya Magvira;
17. Sahabat-sahabat seperjuangan, Annas Miftahurrahman, I GD Setya Wijaya, Elma Nidya Farihah, Diyah Subagio Putri, Davidea Rahma, Syeril Rizka, Nimas Ayu, I GD Setya Wijaya, Tegar PAM, Bagas Satria, dan Muhammad Nur Hidayatullah.
18. Sahabat-sahabat Survivor GNO, Cita Ade Resmi, Siti Nurholisa, Ananda Rani Naila Putri, Triasty Widya Palupi, Elsa Oktavia, Resa Sage, Yaumul Ba'as, Evita Anggraini, dan Shelly Aulia;

19. Keluarga Besar Kelompok Studi Kewirausahaan Muda (KSKM) Periode 2018 serta Pengurus KSKM Periode 2019 yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berorganisasi kepada penulis;
20. Sahabat-sahabat Penyambung Lidah Rakyat di pengurus KSKM 2019 yang selalu memberikan semangat kepada penulis, Mukhammad Syaifin Nuha, Anindya Aulia, Edho Aji, Erma Santona dan Aditya Dewantara;
21. Keluarga KKN 108 Desa Brambang Darussalam Kabupaten Bondowoso yang penulis sayangi Ria Inawati, Antis Sholihatul Mardhiyah, Ni Putu Devi Santya, Rizqy Dhinia, Yuni Aristasari, Abed Nalendra Satya, Fachrizal Zulfikar Ilmi, Prasetio Hadi Kuncoro, Muhammad Arga Hita, Bapak Misjan sekeluarga, Bapak Elfan sekeluarga, Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa Brambang Darussalam.
22. Sahabat-sahabat Ranger yang penulis sayangi, Yovinda Devita Rachmasari, Jayanti Ayu Pratiwi, Septa Karomah, Serly Kurniawati, Nuzulia Fajrina, Dea Fausta Elfaretana, Herin Dika Pratiwi, Aulia Citra dan Ade Fisma;
23. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 29 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
RINGKASAN/SUMMARY	x
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa	9
2.1.1 Pemerintahan Desa	9
2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa.....	9
2.1.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	11
2.1.4 Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa.....	12
2.2 <i>Fraud</i>	13
2.2.1 Definisi <i>Fraud</i>	13
2.2.2 Jenis-jenis <i>Fraud</i>	14
2.2.3 Klasifikasi <i>Fraud</i>	14

2.3 Fraud Diamond	16
2.3.1 Teori <i>Fraud Diamond</i>	16
2.3.2 Elemen <i>Fraud Diamond</i>	16
2.4 Faktor Penyebab Kecurangan.....	19
2.4.1 Kepuasan Kompensasi	20
2.4.2 Gaya Kepemimpinan	20
2.4.3 Sistem Pengendalian Internal.....	21
2.4.4 Penegakan Hukum	22
2.4.5 Budaya Organisasi	23
2.4.6 Perilaku Tidak Etis.....	23
2.4.7 Kompetensi	24
2.5 Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....	25
2.6 Penelitian terdahulu tentang Fraud di Pemerintahan	26
2.7 Pengembangan Hipotesis	33
2.7.1 Pengaruh Kepuasan Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Pengelolaan Keuangan Desa	33
2.7.2 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Pengelolaan Keuangan Desa	34
2.7.3 Pengaruh SPIP Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....	35
2.7.4 Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Pengelolaan Keuangan Desa	36
2.7.5 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Pengelolaan Keuangan Desa	37
2.7.6 Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Pengelolaan Keuangan Desa	38
2.7.7 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....	39
2.8 Kerangka Konseptual Penilitin	40
BAB 3. METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	41

3.3 Populasi dan Sampel	41
3.4 Jenis dan Sumber Data	42
3.5 Metode Pengumpulan Data	42
3.6 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	43
3.6.1 Variabel Dependen	43
3.6.2 Variabel Independen	43
3.7 Analisis Data	47
3.7.1 Statistik Deskriptif	47
3.7.2 Uji Kualitas Data	47
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	48
3.7.4 Uji Regresi Linier Berganda	50
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah	53
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum	54
4.2 Analisis Deskriptif	54
4.2.1 Deskriptif Responden	54
4.2.2 Statistik Deskriptif	57
4.3 Uji Kualitas Data	60
4.3.1 Uji Validitas	60
4.3.2 Uji Reliabilitas	61
4.4 Uji Asumsi Klasik	62
4.4.1 Uji Normalitas	62
4.4.2 Uji Multikolinieritas	64
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	65
4.5 Uji Regresi Linier Berganda	66
4.5.1 Uji F	68
4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	69
4.5.3 Uji t	70
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	71
4.6.1 Pengaruh Kepuasan Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam pengelolaan Keuangan Desa.	71

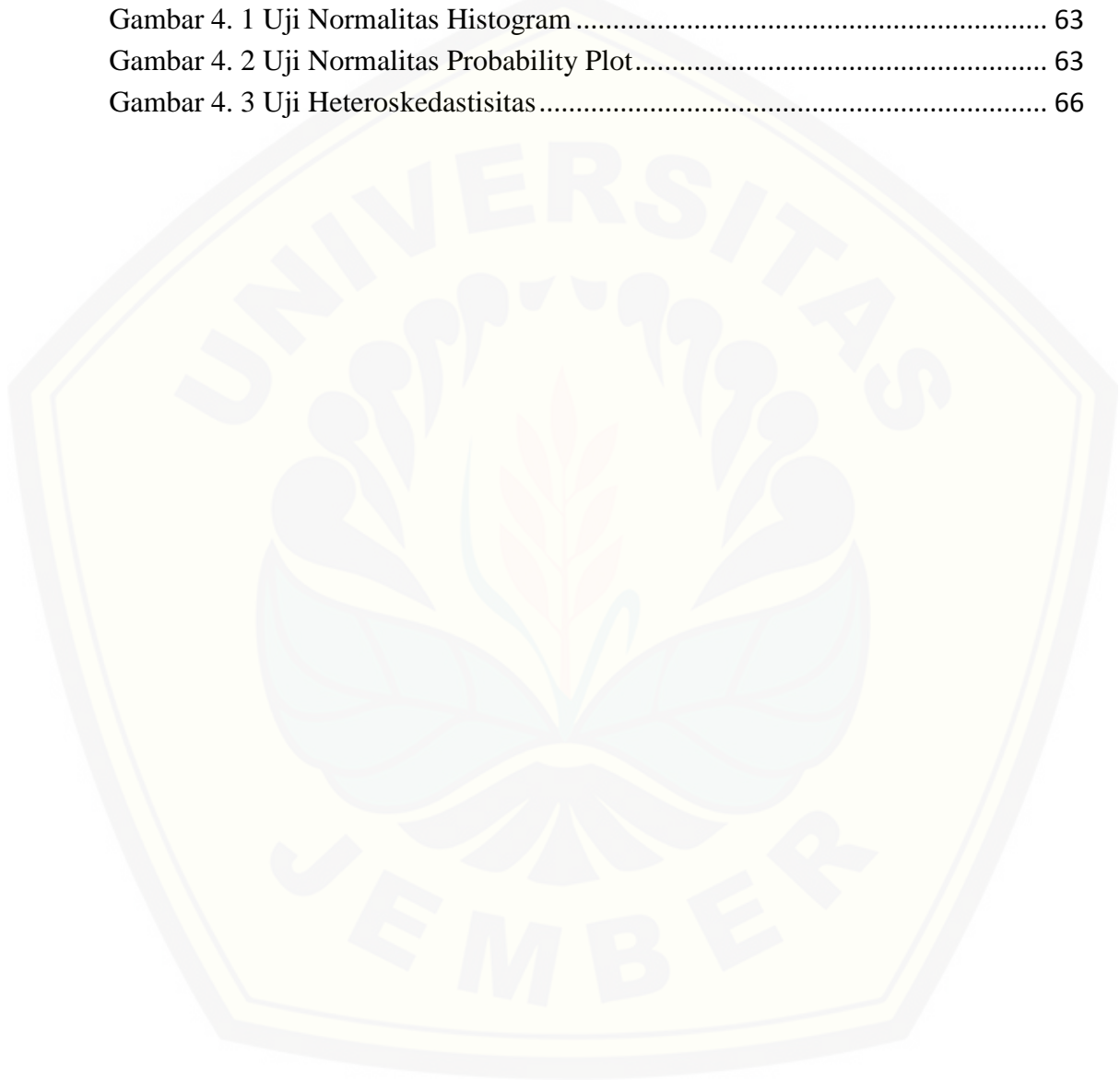
4.6.2 Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam pengelolaan Keuangan Desa.	72
4.6.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam pengelolaan Keuangan Desa. ...	73
4.6.4 Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam pengelolaan Keuangan Desa.	74
4.6.5 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam pengelolaan Keuangan Desa.	74
4.6.6 Pengaruh Perilaku tidak Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam pengelolaan Keuangan Desa.	75
4.6.7 Pengaruh Kompetensi terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam pengelolaan Keuangan Desa.	76
BAB 5. PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Keterbatasan	78
5.3 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Besaran Bantuan Keuangan Desa di Kecamatan Ambulu	25
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3. 1 Pengukuran Skala Likert	42
Tabel 4. 1 Distribusi Kuesioner	54
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	55
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	56
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	56
Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	57
Tabel 4. 7 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	58
Tabel 4. 8 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas.....	60
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas	62
Tabel 4. 10 Perhitungan Hasil Kolmogorov-Smirnov	64
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinieritas	65
Tabel 4. 12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	66
Tabel 4. 13 Hasil Uji F	69
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	69
Tabel 4. 15 Hasil Uji t	70

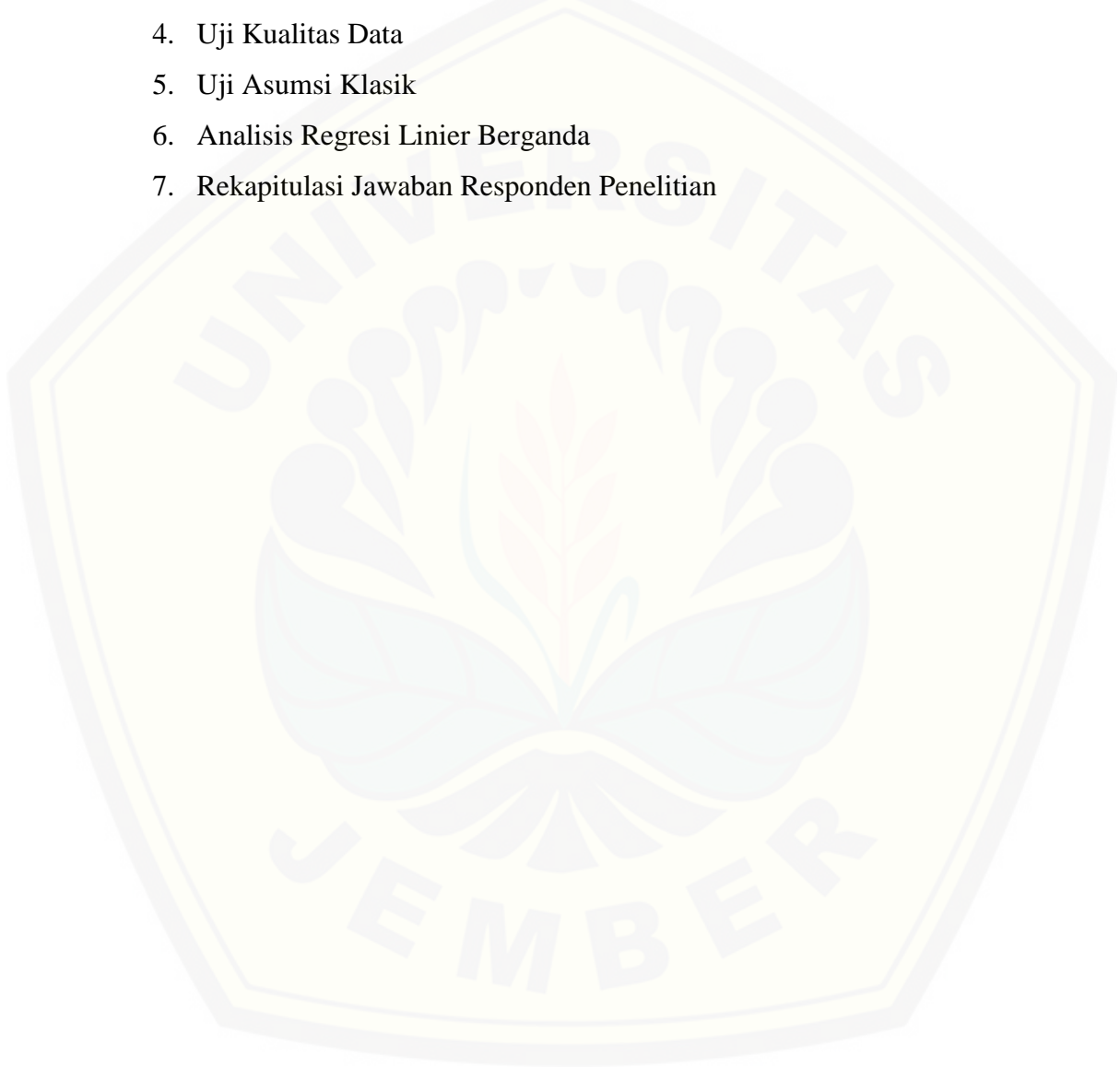
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	10
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual Penelitian	40
Gambar 3. 1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	53
Gambar 4. 1 Uji Normalitas Histogram	63
Gambar 4. 2 Uji Normalitas Probability Plot.....	63
Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas	66



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian
2. Kuesioner Penelitian
3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
4. Uji Kualitas Data
5. Uji Asumsi Klasik
6. Analisis Regresi Linier Berganda
7. Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian



BA B 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan (*Fraud*) merupakan sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja, hal tersebut dinyatakan oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA) dalam Karyono (2013). *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016) memaparkan *fraud* sebagai perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. (ACFE, 2016) membagi *fraud* ke dalam tiga jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu:

1. Korupsi (*Corruption*).
2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*).
3. Kecurangan dalam Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Reporting*).

Salah satu jenis *fraud* yang paling sering terjadi yaitu Korupsi (Wilopo, 2006). Pada tahun 2018, *Transparency International Indonesia* (TII) menyebutkan bahwa skor *Corruption Perception Index* (CPI) sebesar 38. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa skor Indonesia masih berada dibawah angka rata-rata CPI internasional. Selama rentang waktu 2004 hingga 2018 *Indonesia Corruption Watch* (ICW) memaparkan hasil pantauannya bahwa terdapat 104 kepala daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai kasus korupsi. Provinsi yang menduduki peringkat teratas dengan kategori kasus korupsi kepala daerah terbanyak di tahun 2018 jatuh kepada provinsi Jawa Timur. (sumber: detiknews, 2018)

Beberapa kasus penyelewengan juga menjadi problematika bagi pemerintah Kabupaten Jember. Baru-baru ini, tahun 2018 telah ditemukan kasus penyelewengan dana hibah dan dana sosial yang dilakukan oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Jember. Ditahun 2017 juga ditemukan berbagai kasus penyelewengan, diantaranya yaitu kasus korupsi dana Asosiasi PSSI Kabupaten Jember, kasus penyelewengan kopi milik Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP)

Kahyangan sebanyak 11 ton dengan kerugian sebesar Rp. 853 juta dan kasus korupsi alokasi dana desa 2008 yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Pecoro. (sumber: kejar jember, 2018)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 (PP 58/2005) diterbitkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Tidak hanya pemerintah daerah saja yang diwajibkan mengelola keuangannya secara transparan, pemerintah desa pun diwajibkan mengelola keuangannya dengan transparan, akuntabel, partisipatif, tertib serta disiplin anggaran. Tahun 2015 merupakan awal tahun dimana pemerintah pusat memberikan hak penuh kepada aparat desa untuk mengatur dan mengelola keuangan desa yang dialokasikan khusus dalam APBN.

Dana yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada aparat desa tersebut dikenal dengan istilah dana desa. Alokasi dana desa terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sampai dengan akhir 2015, persentase dana desa yang mampu terserap yaitu 82% dari 20,76 triliun yang telah dianggarkan. Tahun 2016 alokasi dana desa sebesar 46,9 triliun dan setiap desa rata-rata mendapatkan alokasi sebanyak 628 juta, pada 2017 sebesar 60 triliun dan setiap desa rata-rata mendapatkan sebanyak 800 juta sedangkan tahun 2018 sebesar 60 triliun dengan dialokasikan secara bertahap, 12 triliun dialokasikan pada tahap awal sedangkan tahap kedua dan tahap ketiga masing-masing mendapatkan sebesar 24 triliun. (sumber: detikfinance, 2017)

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 sudah tercatat 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka kasus korupsi yang telah menimbulkan kerugian negara sebanyak Rp. 40,6 Miliar. Hal tersebut dipaparkan oleh Egi Primayogha yang merupakan peneliti ICW. Peningkatan tindak korupsi dana desa terus terjadi sejak 2015 hingga 2018. Terdapat 17 kasus korupsi pada tahun 2015 yang akhirnya mengalami peningkatan menjadi 41 kasus korupsi pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 terjadi pembengkakan korupsi dana desa sebesar dua kali lipat lebih hingga lahir 96 tindak kasus korupsi dan pada tahun 2018 semester awal tercatat 27 kasus korupsi anggaran desa. Dilihat dari segi pelaku, kepala desa merupakan pelaku terbanyak untuk tindak pidana korupsi dana desa. ICW

melakukan identifikasi terkait potensi korupsi yang bisa dilakukan pihak lain selain kepala desa yaitu 41 orang sebagai perangkat desa.

Berbagai alasan sering digunakan oleh seseorang untuk membenarkan tindak korupsi. Alasan adanya ketidakadilan hingga perasaan yang tidak puas membuat seseorang melakukan kejahatan korupsi. Banyak kalangan pegawai negeri sipil yang merasa bahwa kompensasi yang diterima sangat rendah bahkan tidak sebanding dengan hal yang telah dikerjakannya, sehingga banyak pegawai negeri sipil yang berusaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan melakukan tindakan yang tidak dibenarkan yaitu korupsi. Melakukan penggelembungan nilai anggaran, meninggikan dana surat perintah perjalanan, serta menyalahgunakan dana infrastruktur merupakan beberapa contoh kasus korupsi yang ada di lingkungan pegawai negeri sipil. Faktor yang menjadi penyebab munculnya *fraud* menurut teori *Fraud Diamond* adalah *capability* sebagai elemen yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud*. *Fraud triangle* yang diusung oleh (Cressey, 1953) secara keseluruhan disempurnakan ke dalam bentuk *fraud diamond theory* dimana teori kecurangan yang satu ini terdiri dari berbagai elemen, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi dan kemampuan.

Pressure salah satu elemen dari *fraud diamond* dimana seseorang melakukan *fraud* dikarenakan adanya tekanan. Baik tekanan yang berasal dari internal maupun eksternal. Tekanan akan kebutuhan ekonomi merupakan penyebab terjadinya kecurangan yang paling sering terjadi. Berbagai kebutuhan ekonomi yang sangat kompleks mampu memicu seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan demi memenuhi kebutuhannya. Pada penelitian ini, *pressure* diprosikan oleh kepuasan kompensasi dan gaya kepemimpinan.

Opportunity dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. *Opportunity* merupakan kesempatan yang mampu membuat pelaku dengan bebas melakukan tindak kecurangan dikarenakan lemahnya pengendalian internal, tidak adanya kedisiplinan, sulitnya mengakses informasi, adanya sikap apatis serta tidak tersedianya mekanisme audit (Karyono, 2013). Pengendalian internal patut menjadi perhatian dalam hal ini, dimana munculnya peluang untuk melakukan kecurangan disebabkan karena lemahnya pengendalian internal. Penelitian kali

ini, peluang diproksikan dengan sistem pengendalian internal pemerintah dan penegakan hukum.

Rationalization termasuk elemen *fraud diamond* yang sulit untuk diukur karena rasionalisasi dapat membuat seseorang berfikir jika perbuatan mereka benar dan hal ini mampu menghasilkan berbagai tindak kecurangan terjadi. (Rae dan Subramanian, 2008) dalam Apriadi (2013) memaparkan rasionalisasi sebagai suatu sikap atau proses berfikir dengan pertimbangan moral dan individu karyawan untuk merasionalkan tindakan kecurangan. Rasionalisasi mampu membuat pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya. Penelitian kali ini rasionalisasi diproksikan dengan persepsi mengenai budaya organisasi dan perilaku tidak etis.

Capability merupakan elemen keempat dari teori *fraud diamond*. Hay (2013) dalam Shelton (2014), memaparkan *capability* sebagai sifat dari individu yang melakukan *fraud*, yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya untuk melakukan kecurangan. Definisi diatas menjelaskan bahwa perilaku individu juga termasuk sebagai pemicu munculnya *fraud*. Wolfe dan Hermason (2004) menjelaskan bahwa kemampuan individu adalah sifat-sifat pribadi dan kemampuan yang memainkan peran utama yang menyebabkan *fraud* benar-benar terjadi bahkan dengan kehadiran tiga elemen lainnya. Meskipun terdapat tiga elemen dalam teori *fraud triangle* (*pressure, opportunity, dan rationalization*), tetapi jika tidak ada kemampuan dari pelakunya, maka *fraud* tidak akan terjadi. Pada penelitian kali ini, kemampuan diproksikan dengan persepsi mengenai kompetensi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan telah banyak diteliti. Aini, Prayudi, dan Diatmika (2017) meneliti tentang perspektif *fraud diamond* terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak penelitian mengenai *fraud*. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh secara positif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, pengawasan berpengaruh secara positif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* dalam

pengelolaan keuangan desa, rasionalisasi berpengaruh secara positif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2018) meneliti tentang determinan kecurangan berbasis *diamond fraud* dan perilaku tidak etis sebagai *variabel intervening* pada pemerintah desa di Kabupaten Lumajang, hasilnya menunjukkan bahwa kepuasan kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan di Pemerintah Desa Kabupaten Lumajang, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh negatif terhadap kecurangan di Pemerintah Desa Kabupaten Lumajang, Budaya Organisasi buruk berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan di Pemerintah Desa Kabupaten Lumajang, Perilaku tidak etis memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kecurangan di Pemerintah Desa Kabupaten Lumajang, Kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan di Pemerintah Desa Kabupaten Lumajang.

Berbagai penelitian tersebut belum memiliki hasil yang konsisten sehingga terdapat variabel penelitian yang menunjukkan hasil yang bertolak belakang. Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* tersebut. Penelitian yang berjudul “Perspektif Fraud Diamond terhadap Kecenderungan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa” merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2018), yaitu “Determinan Kecurangan Berbasis *Diamond Fraud* dan Perilaku Tidak Etis Sebagai *Variabel Intervening* pada Pemerintah Desa di Kabupaten Lumajang”.

Pada penelitian kali ini peneliti tidak menjadikan perilaku tidak etis sebagai variabel *intervening*, namun hanya dijadikan sebagai variabel independen dikarenakan hasil penelitian Oktavia menunjukkan bahwa perilaku tidak etis tidak berperan sebagai mediasi untuk memengaruhi kepuasan kompensasi, sistem pengendalian internal pemerintah, budaya organisasi, dan kompetensi terhadap kecurangan (*fraud*). Selain itu, perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian Oktavia terletak pada penambahan variabel independen, yaitu gaya kepemimpinan

dan penegakan hukum. Alasan peneliti menambahkan variabel tersebut dikarenakan adanya penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kecurangan. Oleh karena itu, peneliti berniat menguji kembali variabel tersebut untuk mengetahui apakah dengan objek yang berbeda akan tetap menunjukkan hasil yang sama.

Penelitian ini dilakukan di Jember tepatnya pada desa-desa yang ada di Kecamatan Ambulu. Total Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) secara keseluruhan yang ada di Kecamatan Ambulu pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp. 6.575.633.217 dan Rp. 6.417.477.628. Jumlah ADD dan DD yang besar tersebut harus dikelola dengan baik dan benar agar masyarakat desa mampu merasakan manfaat dari adanya dana desa itu sendiri. Penyerapan dana desa yang optimal tentu akan berdampak pada peningkatan pembangunan desa. Aparatur desa memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa, sehingga dibutuhkan kejujuran, dedikasi, serta komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya.

Dilihat dari fakta yang ada di lapangan, sayangnya prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa yang ada di Kecamatan Ambulu belum sepenuhnya diterapkan, karena masih ada beberapa pengeluaran yang tidak dicatat secara rinci. Selain itu, Bapak Bambang selaku bendahara kecamatan juga menambahkan pemaparannya bahwa pada tahun 2017 telah ditemukan kasus adanya penyalahgunaan pos-pos pengeluaran dari realisasi dana desa sehingga desa tersebut menerima vonis untuk mengembalikan dana desa yang sebelumnya telah dinikmati. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan disalahgunakan untuk perihal lainnya yang dirasa tidak sesuai dengan fungsi utama dana desa.

Berdasarkan pemaparan terkait latar belakang tersebut, peneliti berencana untuk melakukan penelitian dengan menganalisis pengaruh perspektif *fraud diamod* terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di Kecamatan Ambulu. Penelitian ini diharapkan mampu menggali mengenai faktor-faktor atau elemen yang mempengaruhi perilaku kecurangan. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir setiap faktor tersebut untuk mengurangi perilaku kecurangan yang ada di pemerintahan desa.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kepuasan kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa?
5. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa?
6. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa?
7. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antarlain:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepuasan kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antaralain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman dalam bidang akuntansi pemerintahan mengenai kecurangan (*fraud*) dan faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintahan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang kecurangan (*fraud*) yang terjadi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga pihak pemerintahan desa dapat mengambil tindakan untuk meminimalisir perilaku kecurangan tersebut.

b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa dan peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan guna memecahkan masalah sehingga memperoleh gambaran yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara pengetahuan secara teoritis maupun praktiknya.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi maupun menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dalam bidang yang terkait.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.1 Pemerintahan Desa

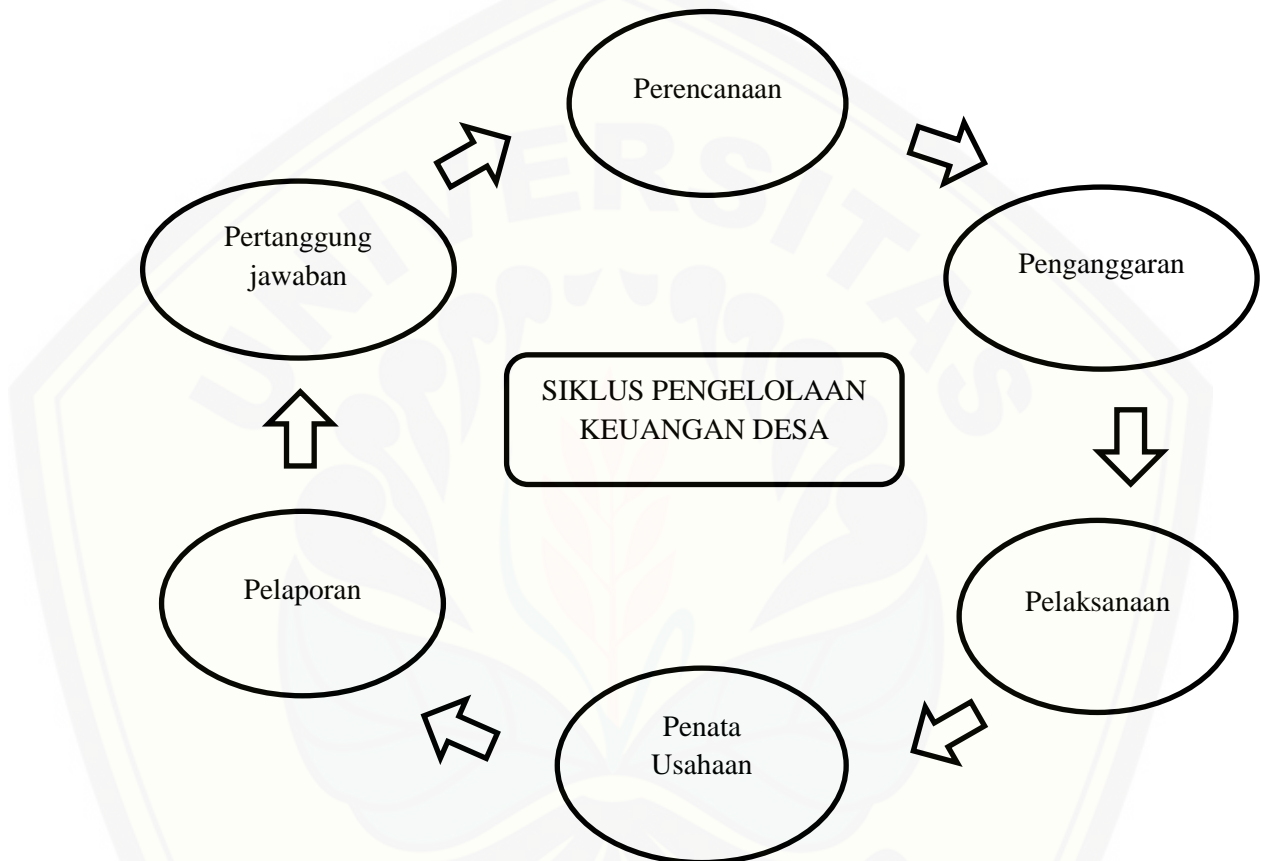
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui, dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai yang tercantum dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 1. Pemerintah desa terdiri dari Kepala desa dan perangkat desa lainnya seperti sekretariat desa, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pemberdayaan masyarakat, kepala seksi pelayanan umum, kepala urusan umum tata usaha, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan perencanaan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa menurut UU desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Gambar rincian proses siklus pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

2.1.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dana hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan

kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa atau perubahan APB Desa;

- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.1.4 Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaanya kepada perangkat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Seksi bertugas menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

2.2 *Fraud*

2.2.1 Definisi *Fraud*

Suatu tindakan yang menyimpang dari aturan, dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, serta dapat menimbulkan kerugian merupakan definisi dari *fraud* (ACFE, 2016). Albercht *et al* (2011) mengartikan *fraud* sebagai hal yang bersifat umum dan memiliki banyak makna, yang terjadi karena kecerdikan manusia dan ditujukan untuk satu pihak untuk memperoleh keuntungan lebih dengan penyajian yang salah. Tidak ada aturan khusus yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengartikan *fraud* yang terdiri dari kejutatan, penipuan, kelicikan dan cara yang tidak wajar yang digunakan sebagai cara untuk menipu orang lain. Satu-satunya cara untuk menjelaskannya adalah bahwa *fraud* merupakan hal yang merusak moral manusia.

Fraud dapat terjadi di semua jenis organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan. Tidak jarang kita menemukan kasus *fraud* yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah. Di Negara Indonesia sendiri, kecurangan lebih dikenal dengan istilah korupsi. Hal tersebut tidak benar. *Fraud* belum tentu tindakan korupsi, bisa jadi berupa penyalahgunaan aset atau kecurangan dalam laporan keuangan, karena korupsi sendiri termasuk kedalam bagian *fraud*. Jadi asumsi bahwa *fraud* adalah korupsi merupakan suatu hal yang tidak tepat (Apriyadi, 2013).

2.2.2 Jenis-jenis *Fraud*

Fraud diklasifikasikan ke dalam lima jenis yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis <i>Fraud</i>	Korban	Pelaku	Penjelasan
1	<i>Employee embezzlement/ occupational Fraud</i>	Pimpinan	Karyawan	Pencurian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh karyawan kepada perusahaan.
2	<i>Management fraud</i>	<i>Stakeholders</i> dan pengguna laporan keuangan	Manajemen puncak	Manajemen puncak memberikan informasi yang bias dalam laporan keuangan.
3	<i>Invesment scams</i>	Investor	Perseorangan	Melakukan kebohongan investasi dengan menanam modal
4	<i>Vendor fraud</i>	Perusahaan yang membeli	Organisasi/ perusahaan yang menjual	Perusahaan mengeluarkan tarif yang mahal dalam hal pengiriman barang
5	<i>Customer fraud</i>	Organisasi atau perusahaan yang menjual	Pelanggan	Pelanggan menipu penjual agar mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari seharusnya.

Sumber: Albercht *et al.*, (2002) dalam Amrizal (2004).

Kecurangan dalam pengelolaan keuangan merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan dengan melakukan kesalahan pencatatan pengeluaran. Karyawan tersebut dapat mencuri atau menikmati aset secara langsung ataupun tidak langsung yang sebenarnya bukan menjadi hak mereka. Tujuannya adalah untuk memenuhi kepentingan pribadi dari karyawan itu sendiri.

2.2.3 Klasifikasi *Fraud*

Organisasi profesional yang bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat atau sering disebut ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) memiliki sebuah misi. Misi dari organisasi tersebut yaitu mengurangi kejadian penipuan dan kejahatan kerah putih serta membantu memperdalam deteksi dan pencegahan penipuan. ACFE menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*. Pohon ini

menggambarkan klasifikasi dari *fraud* dalam bentuk skema hubungan kerja. ACFE dalam Tuanakotta (2010: 195-204) membagi *fraud* dalam tiga jenis berdasarkan perbuatan, yaitu:

1. Korupsi (*Corruption*)

Fraud jenis ini sering kali sulit untuk dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah atau ilegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*). Jenis kejahatan korupsi ini juga dijelaskan dalam UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. UU Tipikor lebih mengacu pada kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

2. Penyimpangan atas aset (*Asset misappropriation*)

Bentuk *fraud* ini paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*). Penyimpangan aset meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mendeteksi penyimpangan atas aset. Teknik terbaik untuk mendeteksi kecurangan tipe ini adalah pemahaman yang baik mengenai pengendalian internal dalam pos-pos.

3. Kecurangan dalam laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Jenis *fraud* yang satu ini memiliki tujuan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*). *Fraudulent Statement* memang lebih dikenal oleh auditor yang biasa melakukan general audit. Jenis kecurangan ini dilakukan oleh pejabat atau eksekutif perusahaan atau instansi pemerintah.

2.3 *Fraud Diamond*

2.3.1 Teori *Fraud Diamond*

Teori *Fraud Diamond* pertama kali dikemukakan oleh Wolfe dan Hermason (2004) yang menyempurnakan teori dari Cressey tentang teori segitiga kecurangan (*triangle fraud*). Wolfe dan Hermason menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian kecurangan perlu unsur *individual's capability* (kemampuan individu). *Capability* merupakan sifat-sifat pribadi dan kemampuan yang memainkan peran utama dalam kecurangan yang mungkin benar-benar terjadi bahkan dengan kehadiran tiga unsur lainnya. Keempat elemen ini dikenal sebagai "*Fraud Diamond*" (Wolfe dan Hermason, 2004). Sifat-sifat terkait elemen *capability* yang sangat penting dalam pribadi pelaku kecurangan yaitu: 1) *Positioning*, 2) *Intelligence and creativity*, 3) *Convidence*, 4) *Coercion*, 5) *Deceit and* 6) *Stress*.

2.3.2 Elemen *Fraud Diamond*

Elemen-elemen teori *fraud diamond* adalah *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), *razionalitation* (rasionalisasi), dan *capability* (kemampuan), dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.3.2.1 *Pressure* (Tekanan)

Elemen pertama dari teori berlian kecurangan adalah *incentive / pressure* (tekanan). Seseorang yang memiliki kebutuhan atau dorongan untuk melakukan kecurangan merupakan pengertian elemen *incentive / pressure* (tekanan). Cressey (1953) menggolongkan tekanan menjadi dua bagian, yakni *perceived nonshareable financial need* dan *non-shareable problems*

Perceived non-shareable financial need diartikan sebagai kebutuhan finansial yang dirasakan tidak dapat dibagikan, hal ini muncul dikarenakan kebutuhan keuangan seseorang yang mendesak sehingga tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan *non-shareable problems* diartikan masalah yang tidak dapat dibagikan kepada orang lain, kondisi ini muncul pada enam kelompok: 1) *Violation of ascribed obligation*, 2) *Problems resulting from personal failure*, 3) *Business reversals*, 4) *Physical isolation*, 5) *Status gaining*, 6) *Employer-*

employee relations. Berdasarkan klasifikasi tekanan menurut Cressey (1953) tersebut, seseorang akan dapat melakukan tindak kecurangan dengan didorong oleh kompensasi yang diterima oleh pegawai. Bukti empiris elemen tekanan tercermin dari kepuasan kompensasi yang mana mampu memengaruhi tindakan kinerja pegawai sehingga dapat mendeteksi potensi terjadinya kecurangan (Kurrohman, 2017; dan Najahningrum 2013).

2.3.2.2 Opportunity (Peluang)

Elemen kedua dari teori *fraud diamond* adalah *opportunity* (kesempatan). Yaitu kesempatan yang memungkinkan terjadinya tindak kecurangan. Munculnya kesempatan disebabkan pengendalian internal yang lemah dalam mencegah maupun mendeteksi adanya *fraud* dalam setiap organisasi. Beberapa faktor yang mampu meningkatkan kesempatan bagi individu dalam melakukan kecurangan diantaranya (Priantara, 2013 : 46 dan Karyono, 2013 : 10)

- a. Sistem pengendalian internal yang lemah, hal ini mengakibatkan susahnyanya penelusuran, ketidakcukupan dan inefisiensi aktivitas pengendalian pada risiko proses bisnis sehingga tidak mampu mengatasi kompleksitas organisasi, kebijakan dan prosedur SDM;
- b. Tata kelola organisasi yang buruk, pengawasan dari pihak komite audit atau independent tidak berjalan semestinya dikarenakan independensi yang mulai pudar;
- c. Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku sering lalai;
- d. Gagal mendisiplinkan atau memberikan sanksi pada pelaku kecurangan;
- e. Keterbatasan akses terhadap informasi dalam memahami keadaan yang sebenarnya sehingga berdampak pada kurangnya jejak audit;
- f. Lalai, apatis, acuh tak acuh, malas, dan tidak kesesuaian kemampuan pegawai.

Oleh karena itu, organisasi perlu membangun sebuah pengendalian atau pengawasan yang baik sehingga karyawan tidak dapat melakukan kecurangan, dan dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat apabila terjadi kecurangan. Bukti empiris elemen peluang tercermin dari sistem pengendalian internal

(Najahningrum, 2013; Chandra, 2015; Shintadevi, 2015; Kurrohman, 2017; Indriani, 2016; dan Kusumastuti, 2012).

2.3.2.3 *Razionalitation* (Rasionalisasi)

Elemen ketiga dari teori *fraud diamond* adalah *rationalization* (rasionalisasi). Rasionalisasi dalam tindak kecurangan merupakan suatu sikap maupun proses berfikir dengan pertimbangan moral dan individu karyawan dalam hal membenarkan tindakannya. Wolfe dan Hermason (2004) menyatakan bahwa pelaku meyakini bahwa apa yang dilakukan sepadan dengan resiko yang akan diterima. Pelaku memahami tindak kecurangan perlu alasan untuk mengurangi rasa bersalah pelaku.

Alasan yang biasa digunakan pelaku dalam membenarkan tindakannya diantaranya (Kurniawan, 2014 : 30) : 1) pelaku menganggap bahwa tindakannya tersebut sudah biasa dan sering dilakukan oleh rekan kerjanya, 2) pelaku merasa berjasa terhadap organisasi maka ia beranggapan harus mendapatkan kompensasi lebih dari yang biasanya diterima, 3) menganggap ia hanya meminjam atau menggunakan barang milik organisasi yang suatu saat akan dikembalikan, 4) tindakan ini tidak akan melukai perasaan siapapun dan beranggapan bahwa ini masalah yang sepele.

Rasionalisasi menjadi teknik pelaku kecurangan dalam mengatasi perbedaan persepsi menjadi orang jujur dimata orang lain. Penelitian empiris membuktikan bahwa rasionalisasi pelaku menjadi komponen elemen kecurangan yang sulit diukur, sehingga diprosikan dengan budaya organisasi. Komitmen manajemen dapat mengarahkan seorang individu dalam melakukan berbagai tindakan serta dukungan budaya organisasi yang memicu individu untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai organisasi (Mustikasari, 2013; Najahningrum, 2013).

2.3.2.4 *Capability* (Kemampuan)

Elemen keempat dari teori *fraud diamond* adalah *capability* (kemampuan), menjadi faktor penting dalam sebuah tindak kecurangan (Wolfe dan Hermason, 2004), adapun beberapa sifat penting dalam tindak kecurangan tersebut meliputi:

- a. *Position/function*: posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan;
- b. *Brains*: pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar;
- c. *Convidence/Ego*: orang yang tepat harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri;
- d. *Coercion Skill*: pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain;
- e. *Effective Lying*: penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi individu harus mampu berbohong meyakinkan, dan harus melacak cerita secara keseluruhan di hadapan para auditor dan investor;
- f. *Immunity to Stress*: pelaku harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres.

2.4 Faktor Penyebab Kecurangan

Faktor penyebab kecenderungan kecurangan pada penelitian kali ini didasarkan atas teori *Fraud Diamond* yang terdiri dari empat elemen yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan. Masing-masing elemen dari *fraud diamond* tersebut di proksikan secara berbeda. Tekanan diproksikan dengan kepuasan kompensasi dan gaya kepemimpinan. Kesempatan diproksikan dengan sistem pengendalian internal dan penegakan hukum. Rasionalisasi diproksikan dengan budaya organisasi dan perilaku tidak etis. Kemampuan diproksikan dengan kompetensi.

2.4.1 Kepuasan Kompensasi

Kompensasi merupakan pemberian pihak organisasi atau badan hukum kepada seseorang atas jasa yang diberikannya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk upah, gaji, komisi dan bonus (Zilmi, 2013). Tujuan dari manajemen kompensasi sendiri yaitu untuk membantu organisasi mencapai tujuan keberhasilan strategi organisasi dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Komponen-komponen yang menjadi pertimbangan kepuasan kompensasi menurut (Wilopo, 2006) yaitu:

- a. Kompensasi keuangan
- b. Pengakuan perusahaan atas keberhasilan dalam melakukan pekerjaan
- c. Promosi
- d. Penyelesaian tugas
- e. Pencapaian sasaran
- f. Pengembangan pribadi

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa kepuasan kompensasi adalah persepsi pegawai tentang kesesuaian imbalan atau gaji dengan pekerjaan yang mereka lakukan (Mustikasari, 2013). Kompensasi sangat penting karena merupakan sumber penghasilan bagi karyawan dan keluarganya. Karyawan yang diberikan kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan maka akan merasa puas sehingga mereka akan bekerja lebih loyal kepada organisasi. Kepuasan kompensasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan.

2.4.2 Gaya Kepemimpinan

(Flippo, 1994) dalam Nurjanah (2008) mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai suatu pola perilaku yang dirancang untuk memadukan kepentingan-kepentingan organisasi dan personalia guna mengejar beberapa sasaran. Rae dan Subramaniam (2008) mengatakan lingkungan yang etis dari suatu organisasi meliputi aspek dari gaya top manajemen dalam mencapai sasaran organisatoris, nilai-nilai mereka dan gaya manajemen atau kepemimpinannya, diargumentasikan bahwa di suatu lingkungan yang lebih etis, karyawan akan cenderung untuk mengikuti peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan tersebut akan menjadi

perilaku secara moral dan bisa diterima sehingga dapat dikatakan bahwa dalam lingkungan yang etis yang dibentuk oleh gaya kepemimpinan yang baik, akan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan yang dilakukan karyawan. Sehingga untuk membentuk suatu lingkungan etis yang jauh dari tindakan *fraud* diperlukan sosok seorang figur pemimpin yang baik dimata karyawan, seorang karyawan yang mempunyai persepsi yang buruk terhadap gaya kepemimpinan pemimpinnya, maka karyawan tersebut akan cenderung melakukan hal-hal yang akan merugikan perusahaan, dalam hal ini melakukan *fraud*.

(Pramudita, 2017) menyatakan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan seorang pemimpin, tentu akan menurunkan tingkat terjadinya *fraud* yang dilakukan karyawan. Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa gaya kepemimpinan merupakan tingkah laku seorang pemimpin yang berinteraksi dengan bawahannya yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan.

2.4.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Mulyadi (2008:180) dalam Adinda (2015) mengemukakan Sistem Pengendalian Internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yakni kendala pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi. Pengendalian internal menurut PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur SPIP menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 terbagi menjadi lima unsur, diantaranya:

- 1) lingkungan pengendalian,
- 2) penilaian resiko,

- 3) kegiatan pengendalian,
- 4) informasi dan komunikasi, dan
- 5) pemantauan pengendalian internal.

Pelaksanaannya diharapkan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi secara utuh dalam instansi pemerintah. Pengendalian internal menjadi salah satu wujud respon manajemen terhadap resiko yang akan dihadapi oleh sebuah entitas. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu sistem yang terdiri dari kebijakan, prosedur, cara, dan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan agar rencana dan tujuan dapat dicapai dengan baik. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif akan menghindarkan terjadinya tindakan-tindakan penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.

2.4.4 Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, menciptakan dan melahirkan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2012:5). Penegakan hukum merupakan suatu penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan yang berlaku. Siapapun yang menerapkan aturan normatif atau menjalankan sesuatu atau tidak menjalankan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia telah menegakkan aturan hukum. Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena penegakan hukum yang dilakukan dengan adil dan transparan mampu mendorong terciptanya kondisi yang aman dan tentram tanpa adanya protes dari salah satu pihak yang merasa dirugikan karena penegakan sebuah hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan.

2.4.5 Budaya Organisasi

Robin dan Judge (2007) dalam Mustikasari (2013) mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu yang membedakan organisasi satu dengan lainnya. Schein (1992:12) dalam Zulkarnain (2013) menjelaskan budaya organisasi sebagai pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Budaya organisasi harus mampu menciptakan teladan yang baik guna membangun kultur yang kuat dalam organisasi yang dipimpinnya. Manajemen organisasi juga harus mampu memberikan bukti yang konkrit akan komitmen budaya organisasi dan sebaliknya memberikan penghargaan yang sesuai atas prestasi atau kontribusi pegawainya terhadap organisasi. dengan demikian tercipta suatu etika perilaku dan struktur organisasi yang kuat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya organisasi merupakan gambaran dari perilaku manajemen yang dapat dicontoh oleh para pegawainya. Seorang pegawai yang melakukan kecurangan akan melakukan pembenaran atas penyimpangan yang dilakukannya karena hal itu dianggap selaras dengan apa yang dilakukan manajemen. Oleh karena itu adanya budaya organisasi yang baik berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan dapat menurunkan potensi kecurangan (*fraud*).

2.4.6 Perilaku Tidak Etis

(Dijk, 2000) dalam Ahriati (2015) mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai suatu perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan yang telah disepakati sebelumnya. (Tang *et al*, 2013) dalam Shintadevi (2015) menjabarkan indikator dari perilaku menyimpang atau perilaku tidak etis dalam organisasi ke beberapa macam, diantaranya yaitu:

- a. Perilaku yang menyalahgunakan kedudukan atau posisi (*abuse position*);
- b. Perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan (*abuse power*);
- c. Perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (*abuse resources*);
- d. Perilaku yang tidak berbuat apa-apa (*no action*).

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa perilaku merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat karena interaksi antar individu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai etika yang dianut. Perilaku tidak etis juga memberikan pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Perilaku tidak etis dapat dilakukan oleh siapapun baik seseorang yang memiliki kekuasaan maupun yang tidak memiliki kekuasaan. Semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk berperilaku tidak etis, maka semakin tinggi pula tingkat kecenderungan kecurangan terjadi (Ahriati, 2015).

2.4.7 Kompetensi

Spencer dan spencer (1993:9) dalam Oktavia (2018) mendefinisikan kompetensi sebagai suatu karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Boutler *et al.* (1996:145) dalam Oktavia (2018) mendefinisikan kompetensi sebagai suatu karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan pegawai mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya.

R. Palan (2008) dalam Indriani (2016) mendeskripsikan enam jenis karakteristik kompetensi yaitu: *knowledge, skills, values, self concept, traits*, dan *motives*. Karakteristik ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu *hard* kompetensi dan *soft* kompetensi. Indikator yang dikembangkan untuk mengukur variabel kompetensi adalah :

- 1). Pemahaman terhadap cara kerja, prosedur kerja, proses kerja,
- 2). Pemahaman terhadap rencana dan target kerja,
- 3). Pemahaman proses kerja pada bagian lain,
- 4). Pemahaman/ kemampuan tentang situasi dan permasalahan organisasi,
- 5). Kemampuan penyesuaian diri, pengendalian diri dan bekerja sama,
- 6). Kemampuan dalam menyampaikan gagasan dan pokok pikiran,
- 7). Penguasaan terhadap peralatan dan teknologi informasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku

yang dapat diperdiksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Kompetensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan

2.5 *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat tahun 2018 merupakan tahun dimana banyak sekali ditemukan kasus korupsi kepala daerah. Tahun ini menghasilkan tersangka dengan berjumlah 29 orang. Provinsi yang menduduki peringkat teratas dengan kategori kasus korupsi kepala daerah terbanyak di tahun 2018 jatuh kepada provinsi Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 14 kepala daerah sebagai tersangka sehingga tidak heran jika provinsi ini berada di posisi teratas dalam hal kasus korupsi. (sumber: detiknews, 2018)

Fraud telah menjalar ke berbagai lapisan sektor pemerintahan. Bukan hanya pada sektor pemerintah pusat, *fraud* telah merambah ke sektor pemerintahan terkecil yaitu pemerintahan desa (ICW, 2018). Seiring dengan hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pembangunan desa dijadikan sorotan perhatian baik dari golongan akademisi, pejabat, maupun politikus. Salah satu contoh *fraud* yang terjadi di pemerintahan desa yaitu kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini perlu diperhatikan dan dikendalikan melalui struktur dan sistem pengendalian yang baik sehingga pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan semestinya.

Tabel 2. 1
Besaran Bantuan Keuangan Desa di Kecamatan Ambulu

No.	Nama Desa	ADD Tiap Desa		DD Tiap Desa	
1	Ambulu	Rp	906.098.333	Rp	864.018.206
2	Karanganyar	Rp	891.882.599	Rp	921.020.761
3	Tegalsari	Rp	876.574.358	Rp	862.615.579
4	Sabrang	Rp	957.426.448	Rp	915.613.740
5	Sumberejo	Rp	1.125.443.002	Rp	1.026.281.013
6	Andongsari	Rp	960.964.006	Rp	934.492.413

No.	Nama Desa	ADD Tiap Desa		DD Tiap Desa	
7	Pontang	Rp	857.244.471	Rp	893.435.916
JUMLAH		Rp	6.575.633.217	Rp	6.417.477.628

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa, 2017

Tabel diatas menunjukkan jumlah ADD dan DD Kecamatan Ambulu pada Tahun 2017. Besarnya jumlah bantuan keuangan desa yang ada di kecamatan Ambulu sudah seharusnya dikelola dengan baik dan benar tanpa meninggalkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun pada kenyataannya, pengelolaan keuangan desa yang ada di Kecamatan Ambulu masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip tersebut. masih ada beberapa pengeluaran yang tidak dicatat secara rinci. Selain itu masih ditemukan kasus adanya penyalahgunaan pos-pos pengeluaran dari realisasi dana desa.

Korupsi merupakan kecurangan yang paling sering terjadi di desa, baik dalam bentuk manipulasi pencatatan keuangan maupun penggelapan yang dapat merugikan negara. Korupsi sering dilakukan oleh seseorang yang berada dalam struktur tertinggi di suatu organisasi. Dalam hal ini kepala desa merupakan pejabat tertinggi di suatu desa, sehingga tindak korupsi rawan dilakukan oleh kepala desa karena mereka merasa memiliki kekuasaan lebih tinggi dibanding dengan perangkat desa lainnya.

Selain kepala desa yang melakukan tindak kecurangan, tidak menutup kemungkinan bahwa perangkat desa yang lain juga melakukan kecurangan jika terdapat tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan untuk berbuat sesuatu yang mampu merugikan negara. Seluruh lapisan instansi seharusnya bersinergi dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa, sehingga potensi kecurangan dapat diidentifikasi dan diminimalisir, untuk selanjutnya dapat ditempuh langkah pengendalian yang ketat sehingga masyarakat desa setempat mampu merasakan manfaat dari adanya dana desa.

2.6 Penelitian terdahulu tentang *Fraud* di Pemerintahan

Beberapa penelitian terkait kecurangan sering kali kita temui, baik penelitian yang menggunakan teori *fraud triangle* maupun penelitian yang menggunakan

teori *fraud diamond*. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari, DP (2013) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* di sektor pemerintahan Kabupaten Batang. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis manajemen, dan komitmen organisasi terhadap *fraud*. Selain itu terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi terhadap *fraud* dan tidak terdapat pengaruh antara keadilan prosedural terhadap *fraud*. Hasil penelitian ini mendukung teori *Fraud Triangle* yang menyatakan bahwa semakin rendahnya penegakan hukum dan keefektifan pengendalian internal maka semakin tinggi pula kecenderungan kecurangan akan terjadi, dimana peluang untuk melakukan kecurangan tersebut semakin terbuka lebar.

Zulkarnain, RM. (2013) melakukan penelitian yang sama dengan Mustikasari, DP (2013) yaitu terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* Pada Dinas Kota Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal dengan *fraud* di sektor pemerintahan. Terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis dengan *fraud* di sektor pemerintahan. Tidak terdapat pengaruh antara kultur organisasi dan penegakan hukum dengan *fraud* di sektor pemerintahan.

Analisis *Fraud* di Sektor Pemerintahan juga dilakukan oleh Pramudita, Aditya. (2013). Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kota Salatiga. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara gaya kepemimpinan, keefektifan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan budaya etis organisasi terhadap *fraud*. penelitian ini juga menunjukkan tidak adanya pengaruh antara komitmen organisasi dan penegakan hukum terhadap *fraud*. namun penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, S., dan A, Zaki. (2014) dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi, efektivitas sistem pengendalian intern, dan komitmen manajemen terhadap *fraud*. sedangkan gaya

kepemimpinan, penegakan hukum, dan budaya etis organisasi tidak terdapat pengaruh dengan kecurangan *fraud*.

Oktavia (2018) melakukan penelitian terkait dengan determinan kecurangan berbasis *diamond fraud* pada Pemerintah Desa di Kabupaten Lumajang memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif antara kepuasan kompensasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya tingkat kepuasan kompensasi pegawai maka semakin besar kecenderungan kecurangan akan terjadi. Semakin rendah sistem pengendalian intern pemerintah, semakin besar kecenderungan kecurangan yang akan terjadi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara budaya organisasi, kompetensi, dan perilaku tidak etis terhadap kecurangan.

Berikut ini beberapa penelitian yang berkaitan dengan *fraud* dan variabel-variabel yang berkaitan dalam penelitian ini:

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti Dan Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mustikasari, DP. (2013) Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang	Variabel independen: penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural, budaya etis manajemen, dan komitmen organisasi. Variabel dependen: kecurangan (<i>fraud</i>)	Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis manajemen, dan komitmen organisasi terhadap <i>fraud</i> . terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi terhadap <i>fraud</i> . dan tidak terdapat pengaruh antara keadilan prosedural terhadap <i>fraud</i> .
2.	Zulkarnain, RM. (2013) Analisis Faktor yang Mempengaruhi terjadinya <i>fraud</i> Pada Dinas Kota Surakarta	Variabel independen: keefektifan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, kultur organisasi, perilaku tidak etis, gaya kepemimpinan, sistem	Pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal dengan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.

No.	Peneliti Dan Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		pengendalian internal dan penegakan hukum. Variabel dependen: kecurangan (<i>fraud</i>)	Terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis dengan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan. Tidak terdapat pengaruh antara kultur organisasi dan penegakan hukum dengan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.
3.	Pramudita, Aditya. (2013) Analisis <i>Fraud</i> di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga	Variabel independen: gaya kepemimpinan, keefektifan sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi, penegakan hukum. Variabel dependen: kecurangan (<i>fraud</i>)	Terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan, keefektifan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan budaya etis organisasi terhadap kecurangan (<i>fraud</i>). tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi dan penegakan hukum terhadap kecurangan (<i>fraud</i>).
4.	Wulandari, S., dan A, Zaki. (2014) Determinan Terjadinya <i>Fraud</i> di Instansi Pemerintahan (persepsi pada pegawai BPK RI Perwakilan NTB)	Variabel independen: gaya kepemimpinan, kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi, efektivitas sistem pengendalian intern, komitmen manajemen. Variabel dependen: kecurangan (<i>fraud</i>)	Terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi, efektivitas sistem pengendalian intern, dan komitmen manajemen terhadap <i>fraud</i> . tidak terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan, penegakan hukum, dan budaya etis organisasi terhadap <i>fraud</i> .
5.	Rachmanta R dan Ikhsan S (2014) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (<i>Fraud</i>) di Sektor Pendidikan Kota Semarang	Variabel independen: keadilan distributif, keadilan prosedural, penegakan peraturan, budaya organisasi, keefektifan sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, komitmen organisasi Variabel dependen: Kecurangan (<i>fraud</i>)	Terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi dengan kecurangan. Terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis dengan kecurangan. Tidak terdapat pengaruh antara keadilan distributif, keadilan prosedural, penegakan peraturan, dan budaya organisasi dengan kecurangan.
6.	Ahriati, D., P,	Variabel independen:	Terdapat pengaruh antara

No.	Peneliti Dan Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Basuki., dan E, Widiastuty (2015) Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Perilaku Tidak Etis dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur	sistem pengendalian internal, asimetri informasi, perilaku tidak etis, kesesuaian kompensasi. Variabel dependen: Kecurangan (<i>fraud</i>)	perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>). tidak terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal, asimetri informasi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>).
7.	Shintadevi, PF. ((2015) Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening	Variabel independen: keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi Variabel dependen: kecenderungan kecurangan akuntansi Variabel intervening: perilaku tidak etis	Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi dengan perilaku tidak etis: terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perilaku tidak etis dengan kecenderungan kecurangan akuntansi.
8.	Mukti, Mochammad Riza Hari (2015)	Variabel independen: Keadilan Kompensasi, Gaya Kepemimpinan, SPI, Etika Organisasi. Variabel dependen: Fraud di sektor pemerintah	Terdapat pengaruh antara variabel keadilan kompensasi, sistem pengendalian internal, dan etika organisasi terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintah dan tidak terdapat pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan terhadap <i>fraud</i> di sektor

No.	Peneliti Dan Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			pemerintah.
9.	Chandra, Devia P.(2016) Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (<i>fraud</i>) pada Dinas Kabupaten Grobogan	Variabel independen: keefektifan pengendalian internal, budaya etis, kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan, asimetri informasi, dan komitmen organisasi. Variabel dependen: kecurangan (<i>fraud</i>)	Terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Tidak terdapat pengaruh negatif budaya etis dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
10.	Indriani (2016) Penerapan Konsep <i>Fraud Diamond Theory</i> dalam Mendeteksi Perilaku Fraud	Variabel independen: kepuasan kompensasi, keadilan organisasi, tekanan situasional, efektivitas pengendalian internal, penegakan hukum, asimetri informasi, budaya organisasi, komitmen organisasi, posisi kerja, tingkat penalaran moral, dan kompetensi Variabel dependen: kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>)	Terdapat pengaruh yang signifikan antara tekanan situasional seperti otoritas atasan, efektivitas pengendalian internal, dan tingkat penalaran moral terhadap kecenderungan perilaku penipuan karyawan. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kompensasi, keadilan organisasi, penegakan hukum, asimetri informasi, budaya organisasi, komitmen organisasi, posisi pekerjaan dan kompetensi terhadap kecenderungan perilaku penipuan karyawan.
11.	Kurrohman, dkk (2017) <i>Determinant of Fraudulent in Government: an Empirical Analysis in Situbondo Regency, East Java, Indonesia</i>	Variabel independen: kepuasan kompensasi, penegakan hukum, keefektifan pengendalian, keadilan prosedural. Variabel dependen: kecurangan (<i>fraud</i>)	Tidak terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, dan keefektifan pengendalian terhadap kecurangan (<i>fraud</i>). terdapat pengaruh negatif antara keadilan prosedural, budaya etis organisasi, dan komitmen

No.	Peneliti Dan Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			organisasi terhadap kecurangan (<i>fraud</i>)
12.	Widiutami (2017) Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>fraud</i>) Akuntansi	Variabel independen: efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan komitmen organisasi. Variabel dependen: kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) akuntansi	Terdapat pengaruh negatif antara efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) akuntansi. Efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) akuntansi.
13.	Yudistira, dkk (2017) Pengaruh Aspek Tekanan, Penegakan Peraturan, Rasionalisasi, dan Wewenang Pegawai Terhadap <i>Fraud</i> (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Karangasem)	Variabel independen: aspek tekanan, penegakan peraturan, rasionalisasi, wewenang pegawai Variabel dependen: kecurangan (<i>fraud</i>)	Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara penegakan peraturan terhadap <i>fraud</i> . terdapat pengaruh positif dan signifikan antara aspek tekanan terhadap <i>fraud</i> . tidak terdapat pengaruh antara rasionalisasi dan wewenang pegawai terhadap <i>fraud</i> .
14.	Oktavia, Trisna Ayu (2018) Determinan Kecurangan Berbasis <i>Diamond Fraud</i> dan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Desa di Kabupaten Lumajang	Variabel independen: kepuasan kompensasi, sistem pengendalian intern pemerintah, nudaya organisasi, kompetensi Variabel dependen: kecurangan (<i>fraud</i>) Variabel intervening: perilaku tidak etis	Terdapat pengaruh signifikan negatif antara kepuasan kompensasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kecurangan. Terdapat pengaruh signifikan positif antara budaya organisasi, kompetensi, dan perilaku tidak etis terhadap kecurangan. Terdapat pengaruh signifikan negatif antara kepuasan kompensasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi terhadap perilaku tidak etis.

No.	Peneliti Dan Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Terdapat pengaruh signifikan positif antara budaya organisasi terhadap perilaku tidak etis.

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Kepuasan Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Elemen pertama dari teori berlian kecurangan adalah *incentive / pressure* (tekanan). Seseorang yang memiliki kebutuhan atau dorongan untuk melakukan kecurangan merupakan pengertian elemen *incentive / pressure* (tekanan). Hasbuan dan Malayu (2002:117) mendefinisikan kompensasi sebagai pendapatan berupa uang maupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk balas jasa terhadap organisasi. Dari sisi karyawan, kepuasan kompensasi merupakan hal yang penting, dimana hal tersebut mampu menentukan tingkat kesejahteraan karyawan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat Darsono (2001) yang menyatakan bahwa seseorang yang terpuaskan kompensasinya tidak akan melakukan reaksi kompromistis dalam bentuk tindakan korupsi.

Salah satu tujuan dari pemberian kompensasi yang sesuai yaitu untuk mendorong karyawan agar bekerja secara produktif serta memicu semangat karyawan untuk bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh manajemen organisasi. Pemberian kompensasi yang sesuai tentu akan memberikan dampak kepuasan tersendiri bagi karyawan, sehingga mampu mengurangi kecenderungan kecurangan. Oleh karena itu kepuasan kompensasi perlu diperhatikan agar karyawan tidak terpicu atau termotivasi untuk melakukan tindakan kecurangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013) menunjukkan adanya pengaruh antara kepuasan kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian Shintadevi (2015) juga memperlihatkan bahwa kepuasan kompensasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian dari keduanya

memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan kompensasi maka semakin rendah kecenderungan kecurangan akan terjadi.

H₁ : Kepuasan kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa

2.7.2 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Thoha (2007) dalam Palupi (2018) menyatakan gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain seperti yang ia lihat. Pramudita (2013) menyatakan bahwa karyawan cenderung mengikuti peraturan organisasi ketika dipimpin dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat. Perilaku karyawan terbentuk dari cara pemimpin dalam mencapai sasaran organisasi dan memberikan motivasi. Lingkungan yang etis dari suatu organisasi meliputi aspek dari gaya top manajemen dalam mencapai sasaran organisatoris, nilai-nilai mereka dan gaya manajemen atau kepemimpinannya sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan yang etis dibentuk oleh gaya kepemimpinan yang baik yang akan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan yang dilakukan karyawan (COSO, 2004) dalam Pramudita (2013).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah salah satu cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan. Gaya kepemimpinan dapat dikatakan akan berpengaruh terhadap risiko kecurangan (*fraud*). Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang baik akan meminimalisir pegawainya untuk melakukan tindakan *fraud*. Begitupun sebaliknya, pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang buruk maka akan mendorong pegawai melakukan tindakan yang merugikan organisasi.

Gaya kepemimpinan yang baik dapat mengurangi peluang untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013) menyatakan terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Penelitian yang dilakukan Pramudita (2013) juga

memiliki hasil yang sama yaitu terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kecurangan (*fraud*). Dapat dikatakan bahwa lingkungan etis yang dibentuk oleh gaya kepemimpinan akan menekan tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh karyawan.

H2 : Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) daalam pengelolaan keuangan desa.

2.7.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Elemen kedua dari teori berlian kecurangan adalah *opportunity* (kesempatan). merupakan kesempatan yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Munculnya kesempatan dikarenakan lemahnya pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan dalam setiap organisasi. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang kurang efektif akan memberikan kesempatan bagi pegawai untuk melakukan kecurangan, hal ini sesuai faktor pendorong kesempatan bagi pegawai untuk melakukan kecurangan yakni memanfaatkan sistem pengendalian intern yang lemah. Perancangan, implementasi dan dipelihara sebuah pengendalian internal oleh TCWC, manajemen, dan karyawan lainnya (*those charge with governance*) guna menangani adanya resiko bisnis dan resiko kecurangan yang dapat mengancam institusi gagal mencapai tujuannya (Tuanakotta, 2015: 93).

Pemerintahan Desa harus melaksanakan PP No 8 Tahun 2006, dimana peraturan tersebut menyatakan bahwa adanya pengendalian internal menjadikan alat dalam pencapaian efektivitas, efisiensi dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) berpendapat bahwa pentingnya pengendalian internal dalam suatu organisasi guna melindungi entitas tersebut dari adanya kelemahan sumber daya manusia yang dimiliki agar terhindar dari adanya kecurangan. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana desa sudah dituntut untuk mandiri maka pemerintah pusat menyediakan dana agar dapat melaksanakan kegiatan pemerintahannya yang disebut dengan

dana desa. Maka dari itu pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi peran penting agar tercapainya tujuan.

Hasil penelitian Wilopo (2006), Najahningrum (2013), Mustikasari (2013), Chandra (2015), Shintadevi (2015), Indriani (2016), Widiutami (2017), Permana (2017), Maula (2017) menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengendalian pemerintah desa perlu menjadi sorotan agar semua berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan (*fraud*). Semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka akan semakin kecil *opportunity* (peluang) bagi pegawai melakukan kecurangan (*fraud*).

H₃ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

2.7.4 Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam tatanan hukum Indonesia tindak pidana *fraud* diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikategorikan dengan tindak pidana penipuan sebagaimana termaktub dalam pasal 378 KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lambat empat tahun”

(Septarina, 2018:3) menjelaskan bahwa hidup bermasyarakat memiliki banyak aturan atau norma baik yang dibentuk oleh adat, kebiasaan maupun lingkungan, tetapi tidak sedikit yang memiliki asosiasi dengan hukum. Implikasinya bila aturan atau norma tersebut dilanggar hanya mengakibatkan sanksi sosial bagi sang pelanggar. Berbeda dengan hukum, yang menentukan bahwa dalam suatu hubungan, setiap orang harus menundukkan diri kepada setiap peraturan yang termaktub.

Pada dasarnya praktik kecurangan akan terus berulang dalam suatu entitas jika pegawai tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Amrizal, 2004) dalam (Putro, 2009). Penegakan hukum yang diterapkan dapat mengukur ada tidaknya resiko *fraud* di suatu instansi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2013) dan Chandra (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum yang baik di suatu instansi pemerintahan dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*).

H₄ : Penegakan hukum berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

2.7.5 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Setiap individu adalah unik, tidak ada yang memiliki karakter seratus persen sama bahkan kembar sekalipun. Karena keunikan ini juga berpengaruh terhadap cara mengurus organisasi. Maka dengan demikian, setiap organisasi memiliki keunikannya sendiri, yang dibentuk salah satunya oleh faktor budaya. Budaya organisasi dibangun dari sejarahnya, nilai, panutan dan tujuan. Semua bagian manajemen organisasi wajib menjaga perilaku agar sesuai dengan budaya organisasi, dan jika perilaku tidak sesuai bahkan acuh tak acuh ditemukan maka perlu dihilangkan (Septarina, 2018:4).

Robin dan Judge (2007) dalam Mustikasari (2013) mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu yang membedakan organisasi satu dengan lainnya. Schein (1992:12) dalam Zulkarnain (2013) menjelaskan budaya organisasi sebagai pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi..

Pentingnya memahami substansi budaya organisasi dan tidak terpengaruh bentuk maupun penampilan merupakan kunci sukses dalam mengidentifikasi kecurangan. Dengan kata lain, memahami budaya organisasi dan bagaimana

pelaksanaan yang sesungguhnya, akan membantu dalam menentukan tingkat potensi *fraud* yang akan terjadi, yaitu resiko tinggi atau resiko rendah (Septarina, 2018:5). Gaya manajemen yang otokratis cenderung menimbulkan *fraud* yang tinggi jika dibandingkan dengan gaya manajemen yang partisipatif. Adanya hubungan internal yang sangat kompetitif juga dapat memicu timbulnya *fraud* menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan hubungan internal yang bersahabat. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Irianto (2012), Kusumastuti(2012), Mustikasari (2013) dan Kurrohman (2017) yang menunjukkan hasil yang sama bahwa terdapat pengaruh antara budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

H₅ : Budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa

2.7.6 Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Griffin dan Ebert (2006) dalam Adelin (2013), perilaku tidak etis merupakan perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah. Perilaku tidak etis muncul karena adanya rasa kurang puas dan kecewa terhadap hasil yang didapat organisasi. Lemahnya pengawasan manajemen dapat mendorong karyawan untuk melakukan kekuasaan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan suatu organisasi. Menurut CIMA dalam Wilopo (2008) berpendapat bahwa budaya organisasi dengan standar etika yang rendah akan memiliki resiko kecurangan yang tinggi.

Perilaku tidak etis adalah suatu tindakan yang menyalahi etika yang dianut dalam suatu organisasi. Tindakan kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada sektor pemerintahan disebabkan oleh perilaku tidak etis yang dilakukan oleh manajemennya sendiri. Perilaku tidak etis yang biasanya dilakukan oleh manajemen diantaranya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, penyalahgunaan sumber daya organisasi serta perilaku tidak berbuat apa-apa. Perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada sektor pemerintahan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pramudita (2013), Rachmanta dan Ikhsan (2014), dan Ahriati, D., P, Basuki., dan E, Widiastuty (2015) menunjukkan adanya pengaruh antara perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi perilaku tidak etis yang dilakukan individu, maka akan meningkat pula tindak kecurangan yang akan terjadi.

H₆ : perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

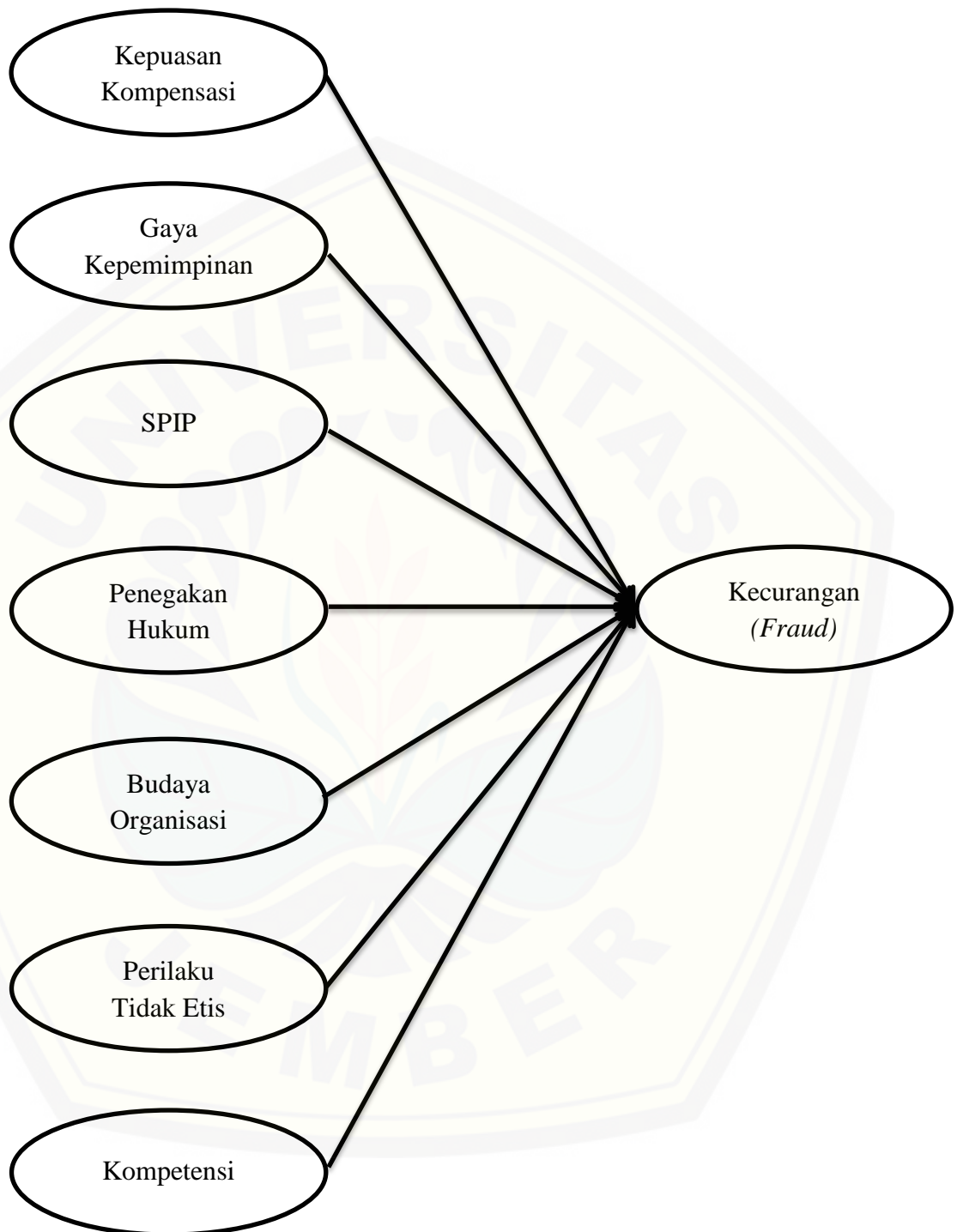
2.7.7 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Elemen keempat dari teori berlian kecurangan adalah *capability* (kemampuan) yang menjadi faktor penting dalam sebuah tindak kecurangan (Wolfe, 2004). Salah satu sifat penting dari elemen kemampuan adalah kompetensi. Kompetensi terdiri dari elemen utama berupa pengetahuan dan keahlian dasar yang diperlukan organisasi guna mencapai misi organisasi (Indriani, 2016). Pemerintahan desa memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, dikarenakan semua kegiatan harus mengacu pada perundang-undangan, RPJMDes baik jangka menengah maupun panjang sesuai dengan musyawarah dengan pihak BPD dan pihak lainnya yang terkait.

Teori *fraud diamond* mengutamakan adanya kompetensi seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. Seseorang yang memiliki kompetensi lebih dibandingkan dengan yang lainnya, cenderung lebih pandai dalam melihat peluang yang dimanfaatkan dari adanya kelemahan pengendalian internal, sehingga ia akan menyalahgunakan kompetensinya untuk melakukan tindak kecurangan. (Wolfe, 2004 dan Priantara, 2012:50). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2018) menunjukkan adanya pengaruh kompetensi terhadap kecenderungan kecurangan.

H₇ : Kompetensi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

2.8 Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual Penelitian

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Soepomo, 2014:23). Penelitian ini terfokus pada kepuasan kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal pemerintah, penegakan hukum, budaya organisasi, dan kompetensi sebagai variabel independen terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa di kecamatan Ambulu.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Perspektif *Fraud Diamond* terhadap Kecenderungan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa” dilakukan pada tahun 2019. Tempat penelitian yaitu di seluruh desa yang ada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, yaitu Desa Andongsari, Desa Sumberejo, Desa Pontang, Desa Karang Anyar, Desa Sabrang, Desa Tegalsari dan Desa Ambulu.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut (Indriantoro dan Supomo, 2002:115) populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang bekerja di seluruh Pemerintahan Desa Kecamatan Ambulu, yaitu sebanyak 98 perangkat desa. Sampel menurut Arikunto (2002:117) adalah wakil dari populasi yang diteliti. Sampel yang akan diambil dalam penelitian kali ini yaitu sebanyak 56 sampel yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pemberdayaan masyarakat, kepala seksi pelayanan umum, kepala urusan umum tata usaha, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian kali ini yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* yang terdiri dari perangkat-perangkat desa yang terlibat dalam

pengelolaan keuangan desa serta memiliki kriteria dengan pengalaman kerja minimal satu tahun.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung ke objek penelitian (Kuncoro, 2013:143; Supomo, 2014:146). Data primer dalam penelitian ini berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari perangkat desa yang diperoleh secara langsung dari responden masing-masing perangkat desa yang sudah ditentukan sesuai dengan karakteristik pemilihan sampel. Sumber data dalam penelitian ini berupa kuesioner yang disebar kepada 56 aparat desa yang memenuhi kriteria responden di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian pada kali ini menggunakan metode survei dengan mengumpulkan kuisisioner. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pernyataan tertulis (Indriantoro dan Soepomo, 2014: 152). Kuisisioner adalah daftar pernyataan terstruktur yang diajukan kepada responden. Kuisisioner disebar kepada responden untuk diisi sesuai dengan pendapat dan persepsi responden. Penjelasan terkait tata cara pengisian kuisisioner tersebut dipaparkan oleh peneliti didalam kuisisioner yang diberikan. Perihal pengukuran, setiap responden diminta untuk memberikan pendapatnya mengenai suatu pernyataan dengan menggunakan skala likert dengan penilaian dari 1 sampai dengan 5. Penilaian dalam kuisisioner sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Tabel Pengukuran Skala Likert

No.	Kategori Jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.6 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (biasa disebut dengan variabel Y) adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang mempengaruhinya. Sedangkan variabel independen (biasa disebut dengan variabel X) adalah variabel yang mempengaruhi keberadaan variabel dependen.

3.6.1 Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian kali ini yaitu kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa merupakan persepsi pegawai instansi pemerintahan mengenai kecurangan pengelolaan keuangan yang sering terjadi di sektor pemerintah desa. Fraud merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu (BPK RI : 2007) dalam Rachmawati (2014). Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin tinggi pula frekuensi kecurangan yang terjadi. Variabel ini menjadi pusat perhatian dalam sebuah penelitian karena dapat mendeteksi dan menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahan yang akan terjadi. Pengukuran ini memiliki 5 item pernyataan dengan menggunakan instrumen yang mengacu pada (ACFE, 2016) yang dikembangkan oleh Mustikasari (2013) dan diukur menggunakan skala likert 1-5. Indikator kecurangan diantaranya:

1. Penyalahgunaan laporan keuangan
2. Penyalahgunaan aset
3. korupsi

3.6.2 Variabel Independen

Pada penelitian kali ini yang menjadi variabel independen adalah sebagai berikut:

- a. Kepuasan Kompensasi

Kepuasan kompensasi merupakan proksi dari elemen *fraud diamond* yakni *pressure* (tekanan). Tingkat kepuasan seorang karyawan terhadap sesuatu yang diterimanya berupa materiil maupun non materiil sebagai imbalan atas kontribusi

yang diberikan karyawan kepada organisasi tempat mereka bekerja merupakan pengertian dari kesesuaian (Mustikasari, 2013). Pengukuran variabel ini menggunakan 6 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Wilopo (2006) dan Mustikasari (2013) namun sudah disesuaikan dengan kondisi pemerintahan desa sehingga menggunakan tunjangan. Jawaban responden diukur dengan menggunakan skala likert 1-5, jika jawaban menunjukkan semakin tinggi maka semakin tinggi pula kepuasan kompensasi yang dirasakan responden. Indikator pengukuran kepuasan kompensasi tersebut diantaranya yaitu:

1. Kompensasi keuangan
 2. Pengakuan instansi atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan
 3. Promosi
 4. Penyelesaian tugas
 5. Pencapaian sasaran
 6. Pengembangan pribadi
- b. Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pimpinan kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Rivai, 2010). Kinerja karyawan tentu akan menjadi salah satu hal yang mampu dipengaruhi oleh penerapan gaya kepemimpinan itu sendiri. Pengukuran variabel gaya kepemimpinan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Fiedler dalam Pramudita (2013) yang terdiri dari 5 pernyataan dan diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Indikator pengukuran gaya kepemimpinan diantaranya:

1. Relasi pimpinan dengan bawahan
 2. Delegasi tugas
 3. Struktur tugas
 4. Etika pimpinan
 5. Posisi kekuatan
- c. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan proksi dari elemen *fraud diamond* yakni *opportunity* (peluang). (Pratiwi : 2017)

mendefinisikan keefektifan sistem pengendalian internal sebagai persepsi pegawai mengenai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan lima item pertanyaan yang dikembangkan sebagai pengukuran. Lima pertanyaan tersebut dikembangkan dari unsur-unsur pengendalian internal menurut COSO (2004) maupun PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Pengukuran menggunakan skala likert 1-5. Semakin tinggi hasil jawaban responden, maka semakin kecil peluang adanya kecurangan dikarenakan semakin kuatnya sistem pengendalian intern pemerintah dalam pemerintah desa yang bersangkutan. Variabel keefektifan sistem pengendalian internal diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

d. Penegakan Hukum

(Chaerudin : 2008) mengungkapkan bahwa pengertian hukum secara makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro hanya terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengukuran variabel penegakan hukum menggunakan instrumen yang dikembangkan dari penelitian (Zulkarnain : 2013) yang terdiri dari 6 item pernyataan dengan menggunakan skala likert 1-5. Indikator pengukuran penegakan hukum diantaranya:

1. Adanya aturan hukum
2. Disiplin kerja
3. Tanggung jawab

4. Proses penegakan hukum
 5. Ketaatan terhadap hukum
- e. Budaya organisasi

Budaya organisasi merupakan proksi dari elemen *fraud diamond* yakni *rationalization* (rasionalisasi). Budaya organisasi merupakan bentuk gambaran dari perilaku manajemen yang dapat dicontoh oleh para pegawainya (Mustikasari, 2013). Variabel budaya organisasi diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Jika jawaban responden menunjukkan hasil yang tinggi, maka rasionalisasi pegawai untuk melakukan tindak kecurangan rendah. Variabel budaya organisasi yang dikembangkan oleh Najahningrum (2013) dan Mustikasari (2013), diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Model peran yang visible
 2. Komunikasi harapan-harapan etis
 3. Pelatihan etis
 4. Hukuman bagi tindakan tidak etis
 5. Mekanisme perlindungan etika
- f. Perilaku Tidak Etis

Perilaku menyimpang seseorang yang tidak sesuai dengan etika yang diterapkan dalam lingkungan sekitar disebut sebagai perilaku tidak etis. Seseorang yang melakukan perilaku tidak etis tersebut mengetahui bahwa perbuatannya menyimpang namun tetap melakukannya karena diperlukan pengorbanan pribadi untuk bertindak sesuai dengan etika. Pengukuran variabel perilaku tidak etis menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Tang *et.al* (2002 dan 2003) yang terdiri dari 4 item pernyataan dengan menggunakan skala likert 1-5. Indikator perilaku tidak etis diantaranya :

1. Perilaku yang menyalahgunakan kedudukan;
2. Perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan;;
3. Perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi;
4. Perilaku yang tidak berbuat apa-apa.

g. Kompetensi

Kompetensi merupakan *proxy* dari elemen *capability* (kemampuan). Kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu (Palan, 2008). Jika jawaban responden menunjukkan hasil yang tinggi, maka akan semakin rendah kecurangan yang terjadi. Pengukuran variabel kompetensi menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Indriani (2016) yang terdiri dari 7 item pernyataan dengan menggunakan skala likert 1-5. Indikator perilaku kompetensi diantaranya:

1. Pemahaman terhadap cara kerja, prosedur kerja, proses kerja;
2. Pemahaman terhadap rencana dan target kerja;
3. Pemahaman proses kerja pada bagian lain;
4. Pemahaman atau kemampuan tentang situasi dan permasalahan organisasi;
5. Kemampuan penyesuaian diri, pengendalian diri dan bekerja sama
6. Kemampuan dalam menyampaikan gagasan dan pokok pikiran;
7. Penguasaan terhadap peralatan dan teknologi informasi.

3.7 Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang membahas tentang bagaimana merangkum sekumpulan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan cepat memberikan informasi yang disajikan dalam bentuk grafik, tabel, nilai pemusatan, dan nilai penyebaran. Statistika deskriptif mendeskripsikan data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2016).

3.7.2 Uji Kualitas Data

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuisioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna apabila instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan dan tingkat keabsahannya.

a. Uji Validitas

Tujuan dari uji validitas yaitu untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. (Ghozali 2016:52) berpendapat bahwa uji validitas digunakan untuk menguji sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner dimana kuisisioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisisioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Konstruk dikatakan valid jika nilai Pearson Correlation $>0,5$ dan signifikan $<0,05$

b. Uji Reliabilitas

Fungsi uji reliabilitas yaitu sebagai alat untuk mengukur kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisisioner dikatakan handal apabila jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Penelitian ini menggunakan teknik pengujian Cronbach's Alpha. Kriteria pengujian adalah jika koefisien alpha (α) $> 0,7$ maka instrumen yang digunakan dapat dikatakan reliabel (Ghozali, 2016:47).

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji hipotesis, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis linier berganda yaitu dengan uji asumsi klasik yang digunakan untuk menguji apakah dapat memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, mengingat tidak semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Analisis grafik dan uji statistik merupakan cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016:10). Pada penelitian ini uji asumsi normalitas menggunakan analisis grafik dengan melihat normal probability plot yang

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal, dan uji statistik dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov.

Pada prinsipnya, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan untuk asumsi normalitas antara lain:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Sedangkan dalam uji statistik Kolmogorov-Smirnov, penentuan normal atau tidaknya suatu distribusi data ditentukan berdasarkan taraf signifikan hasil hitung.

Dasar pengambilan keputusannya:

- 1) Apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti ada data residual terdistribusi tidak normal.
- 2) Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam regresi pada penelitian ini, dapat dilihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu model regresi dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas ketika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak

kurang dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak memiliki masalah multikolinieritas (Ghozali, 2016:103)

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam pengujian ini adalah menggunakan grafik scatterplot.

Uji scatterplot yaitu melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPERD dengan residualnya SRESID. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada plot yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2016:134)

3.7.4 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel (Y). Uji regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Mengingat penelitian ini menggunakan 7 variabel independen, maka persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

Keterangan:

Y = Kecurangan (*Fraud*)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Kepuasan Kompensasi

X_2 = Gaya Kepemimpinan

X_3 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

X_4 = Penegakan hukum

X_5 = Budaya Organisasi

X_6 = Perilaku Tidak Etis

X_7 = Kompetensi

e = Kesalahan regresi (error)

a. Uji F

Pada analisis regresi, Uji F harus dilakukan untuk menguji kelayakan model. Selain itu, Uji F dilakukan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$ berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian R^2 digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. R^2 berkisar antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Ghozali (2016:95) mengatakan apabila R^2 sama dengan 0, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan apabila R^2 semakin kecil atau mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen semakin kecil terhadap variabel dependen. Apabila R^2 semakin besar mendekati 1, hal ini menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

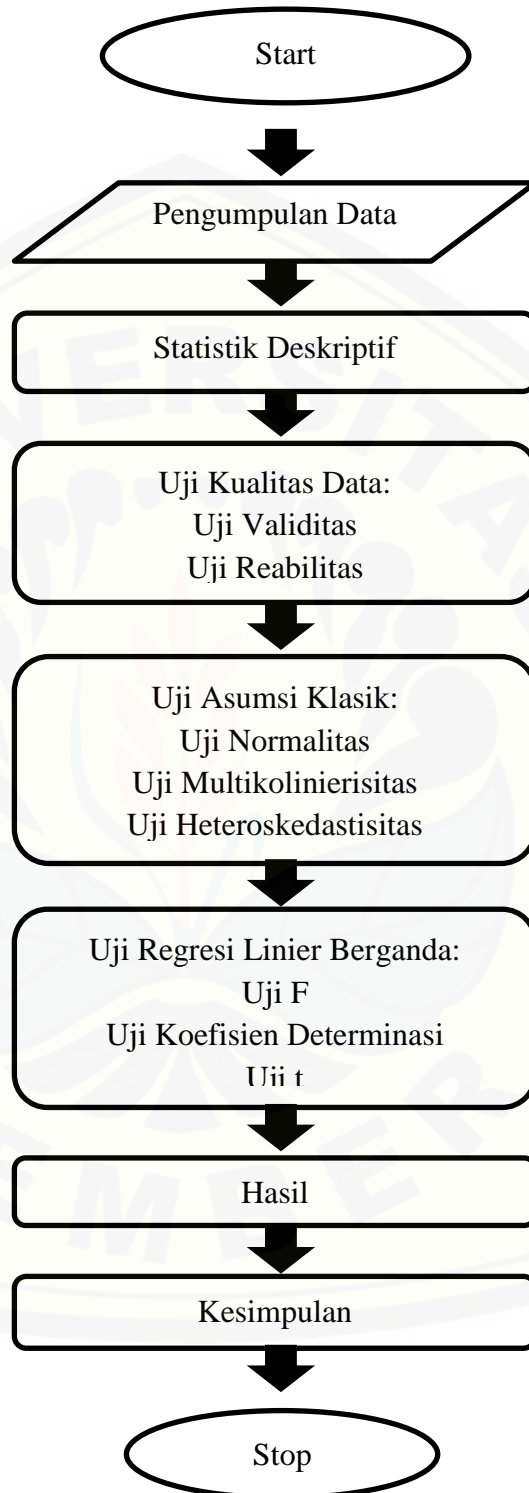
c. Uji t

Ghozali (2016:99) menyatakan uji t dalam analisa regresi linier berganda memiliki maksud untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y). Pengujian pada uji hipotesis secara parsial ini menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai signifikansi $t < 0,05$, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen
- 2) Apabila nilai signifikansi $t > 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.



3.8 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3. 1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kepuasan kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal pemerintah, penegakan hukum, budaya organisasi, perilaku tidak etis, dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak terdapat pengaruh antara kepuasan kompensasi dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan persepsi perangkat desa yang ada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
2. Tidak terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan persepsi perangkat desa yang ada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
3. Tidak terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal pemerintah dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan persepsi perangkat desa yang ada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
4. Terdapat pengaruh antara penegakan hukum dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan persepsi perangkat desa yang ada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
5. Terdapat pengaruh antara budaya organisasi dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan persepsi perangkat desa yang ada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
6. Tidak terdapat pengaruh antara perilaku tidak etis dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan persepsi perangkat desa yang ada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
7. Tidak terdapat pengaruh antara kompetensi dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan persepsi perangkat desa yang ada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut yaitu:

1. Beberapa pernyataan kuesioner yang bias
2. Beberapa pernyataan kuesioner yang kalimatnya susah untuk dijangkau serta dipahami oleh responden
3. Indikator kuesioner *capability* tidak menggunakan secara murni perspektif *fraud diamond*, namun di modifikasi dari penelitian terdahulu sehingga tidak mengukur yang seharusnya diukur.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Adapun saran tersebut diantaranya:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempersiapkan pernyataan kuesioner yang lebih jelas, sehingga tidak terdapat pernyataan kuesioner yang mengandung banyak makna sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih fokus dan pasti.
2. Peneliti selanjutnyadiharapkan menggunakan kalimat yang lebih sederhana untuk pernyataan yang ada pada kuesioner sehingga responden mampu menjangkau dan memberikan jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan indikator kuesioner *capability* yang sesuai dengan perspektif *fraud diamond*, sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang sesuai dengan konteks yang akan diukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelin, Vani. 2013. Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Studi pada BUMN Kota Padang. *Jurnal 3*.
- Adinda, YM., S. Ikhsan. 2015. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. *Jurnal Analisis Akuntansi* 4(3):8-9
- Ahriati, D., P, Basuki., dan E, Widiastuty. 2015. Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Perilaku Tidak Etis, dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal InFestasi* 11 (1): 41-45
- Aini, Nurul., Prayudi, Made Aristia., dan Diatmika, Putu Gede. 2017. Pengaruh Perspektif Fraud Diamond Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. (Vol:8 No:2)
- Albrecht, W.S., C.C. Albrecht., dan C.D. Albrecht. 2006. *Fraud Examination*. Second Edition. Thomson South-Western.
- Ambarwati, N. 2015. Gaya Kepemimpinan yang Efektif dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan pada PT. Sumber Mas Indah Plywood. *Jurnal Mahasiswa*.
- Apriadi, Rangga Nur. 2013. *Determinan Terjadinya Fraud di Instansi Pemerintahan*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Arfahani. 2018. Dana Desa, Gambaran Proporsi Alokasi Dana Desa Terhadap Infrastruktur dan Kesehatan
<https://www.kompasiana.com/arfahani/5bdc62f96ddcae19055b4003/dana-desa-gambaran-proporsi-alokasi-dana-desa-terhadap-infrastruktur-dan-kesehatan?page=all> [Diakses pada 15 Mei 2019]
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). <https://antikorupsi.org/>

- Bestari, D. Suma. 2016. Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. *JOM Fekon (3)*: 14361447
- Chaerudin, S.A. Dinar, dan S. Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama.
- Chandra, Devia Prapnala dan Sukardi Ikhsan. 2015. Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*) Pada Dinas Pemerintah Se Kabupaten Grobogan. *Accounting Analysis Journal* 4 (3). ISSN 2252-6765
- Cressey, Donald R. 1953. *Other People's Money*. Paterson Smith. Montclair
- Darsono, 2001. Korupsi Sebagai Kompensasi Underpayment: Suatu Tinjauan Teori Equity. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 3 (2):477
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8 Cetakan Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hasibuan, Malayu, S.P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indonesia Corruption Watch. 2004-2018. Jumlah Kasus Korupsi. ICW: Jakarta
- Indriani, Irma. A. Suroso. Dan S. Maghfiroh. 2016. Penerapan Konsep Fraud Diamond Theory dalam Mendeteksi Perilaku Fraud. Universitas Jendral Soedirman
- Irianto, Gugus. 2009. Integrity, Unethical Behavior, and Tendency of Fraud. *Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 144-163
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.
- Kurniawan, Ardeno. 2014. *Fraud di Sektor Publik dan Integritas Nasional*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPF

- Kurrohman, T., Lailiyah, A., dan Wahyuni, N.I. 2017. Determinant of Fraudulent in Government: An Emprical Analysis in Situbondo Regency, East Java, Indonesia. *International Journal of Economic and Management* 11 (S1):133-140
- Kusumastuti, Nuratri, dkk. 2012. Anaisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Maula, Kholida Atiyatul. 2017. Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Pendorong Tindak Kecurangan Terhadap Kecenderungan Aparatur Pemerintah Melakukan Fraud (Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Banyumas). *Journal Uniska*. 2(1): 273-287
- Mukti, Mochammad R. H. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintah (Studi Kasus Pada Pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
- Mustikasari, D. P. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal* 2 (3):257.
- Najahningrum. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Nurjanah. 2008. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi pada Biro Lingkup Departemen Pertanian). *Tesis*. Semarang: Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Oktavia, Trisna Ayu. 2018. Determinan Kecurangan Berbasis *Diamond Fraud* dan Perilaku Tidak Etis sebagai *Variabel Intervening* pada Pemerintah Desa di Kabupaten Lumajang. Fakultas Ekonomi Universitas Jember
- Palupi, Arin Diah Nawang. 2018. Analisis Kecenderungan Fraud di Pemerintah Desa dengan Pendekatan Fraud Triangle. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 28 Agustus 2008: Jakarta.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Pramudita, Aditya. 2013. Analisis Fraud di Sektor Pemerintah Kota Salatiga. *Accounting Analysis Journal* 2 (1): 36-43
- Pratiwi, Ekaning. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas se-Kabupaten Jember). *Skripsi*. Jember: Program Sarjana Universitas Negeri Jember
- Rachmanta, R., S, Ikhsan. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud) di Sektor Pendidikan Kota Semarang. *Jurnal Analisis Akuntansi* 3 (3): 387-397
- Rachmawati, K.K. 2014. Pengaruh Faktor-Faktor dalam Perspektif *Fraud Triangle* Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Rivai, V. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Santoso, Audrey. 2018. Jatim Jadi Provinsi Juara Kasus Korupsi Kepala Daerah Terbanyak Versi ICW.
<https://news.detik.com/berita/d-4346075/jatim-jadi-provinsi-juara-kasus-korupsi-kepala-daerah-terbanyak-versi-icw> [Diakses pada 15 Mei 2019]
- Shintadevi. 2015. Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai *Variabel Intervening*. *Jurnal Nominal* 4 (2): 111-125.
- Simorangkir, Eduardo. 2017. Pemerintah Kucurkan Dana Desa sejak 2015, Apa saja hasilnya?

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3606172/pemerintah-kucurkan-dana-desa-sejak-2015-apa-saja-hasilnya> [Diakses pada 15 Mei 2018]

Spencer, Lyfe & Signe M. Spancer. 1993. *Competence at Work, Models For Superior Performance*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.

Soekanto, S. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sudibyو. 2016. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam Mendeteksi Risiko Fraud di PT. Kaltim Industrial Estate. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Snata Dharma

Tuannakota, T.M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Edisi Kedua. Jakarta. Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Widiutami. 2017. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 7 (01).

Wilopo. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Kasus pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.

Wolfe, David T dan Dana R. Hermason. 2004. The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal (management fraud)* : 38-42

Wulandari, S., dan A, Zaki. 2014. Determinan Terjadinya Fraud di Instansi Pemerintahan (*persepsi pada pegawai BPK RI Perwakilan NTB*). Universitas Brawijaya Malang.

Zilmi. 2013. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) pada SKPD Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Zulkarnain. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas Se-Kota Semarang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.





LAMPIRAN

Lampiran 1

Kisi-kisi Instrumen

No.	Variabel	Indikator	Pertanyaan Nomor
1	Kepuasan Kompensasi Wilopo (2006), Mustikasari (2013), Maula (2017) dalam Oktavia (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompensasi keuangan 2. Pengakuan instansi atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan 3. Promosi 4. Penyelesaian tugas 5. Pencapaian sasaran 6. Pengembangan pribadi 	1,2,3,4,5 dan 6
2	Gaya Kepemimpinan Fiedler (2013), Pramudita (2013) dalam Palupi (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relasi pimpinan dengan bawahan 2. Delegasi tugas 3. Struktur tugas 4. Etika pemimpin 5. Posisi kekuatan 	7,8,9,10 dan 11
3	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (PP No. 60 Tahun 2008 Tentang SPIP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern 	12,13,14,15 dan 16
4.	Penegakan Hukum Zulkarnain (2013) dalam Palupi (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya aturan hukum 2. Disiplin kerja 3. Tanggung jawab 4. Proses penegakan hukum 5. Ketaatan terhadap hukum 	17,18,19,20,21 dan 22
5	Budaya Organisasi Mustikasari (2013), Najahningrum (2013) dalam Oktavia (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran model visible 2. Komunikasi harapan-harapan etis 3. Pelatihan etis 4. Hukuman bagi tindakan tidak etis 5. Mekanisme perlindungan etika 	23,24,25,26 dan 27
6	Perilaku Tidak Etis Wilopo (2006) dalam Palupi (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku manajemen yang menyalahgunakan sumber daya organisasi 2. Perilaku manajemen yang mengabaikan suatu peraturan 3. Perilaku manajemen yang menyalahgunakan kedudukan 4. Perilaku manajemen yang tidak berbuat apa-apa 	28,29,30 dan 31

No.	Variabel	Indikator	Pertanyaan Nomor
7	Kompetensi Indriani (2016) dalam Oktavia (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman terhadap cara kerja, prosedur kerja, proses kerja; 2. Pemahaman terhadap rencana dan target kerja; 3. Pemahaman proses kerja pada bagian lain; 4. Pemahaman atau kemampuan tentang situasi dan permasalahan organisasi; 5. Kemampuan penyesuaian diri, pengendalian diri dan bekerja sama 6. Kemampuan dalam menyampaikan gagasan dan pokok pikiran; 7. Penguasaan terhadap peralatan dan teknologi informasi. 	32,33,34,35,36,37 dan 38
8	Kecurangan (<i>fraud</i>) Mustikasari (2013) dalam Oktavia (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan laporan keuangan 2. Penyalahgunaan aset 3. Korupsi 	39,40,41,42 dan 43

Lampiran 2**KUESIONER PENELITIAN**

Kepada Yth
Bapak/Ibu/Sdr/i/ Pegawai Instansi Pemerintah
Di tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Wasilah Agustina
NIM : 160810301054
Prodi : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Jember

Memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk kiranya dapat berpartisipasi dalam mengisi kuisisioner penelitian berikut, berkaitan dengan penyusunan skripsi yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan Program Studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Jember dengan judul **“Perspektif *Fraud Diamond* terhadap Kecenderungan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)”**.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Oleh karena itu, dimohon kesediaannya untuk mengisi/menjawab kuisisioner ini dengan sejujurnya. **Kuisisioner ini hanya untuk keperluan skripsi tidak untuk dipublikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga.**

Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam mengisi kuisisioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Wasilah Agustina

IDENTITAS RESPONDEN

- Nama Instansi (Desa) :**
- Nama (boleh tidak diisi) :**
- Usia :**
- Jenis Kelamin :** Laki-laki Perempuan *)
- Jabatan :**
- Lama Jabatan :**
- Pendidikan Terakhir :** SMA D3 S1 2 3

*) memberi tanda *checklist* (√) pada pilihan yang tersedia

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berikut ini merupakan pernyataan-pernyataan yang mewakili pendapat-pendapat umum mengenai kondisi didalam instansi saudara. Tidak ada pernyataan benar atau salah. Saudara mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Kami ingin mengetahui seberapa jauh Saudara setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, dengan memberi tanda *checklist* (√) pada pilihan yang tersedia sebagai berikut:

Penilaian:

- STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
N : Netral
S : Setuju
SS : Sangat Setuju

Daftar Pernyataan Kuesioner

No	Kepuasan Kompensasi	SS	S	N	TS	STS
1	Tunjangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan saya					
2	Di pemerintah desa ini insentif diberikan dalam keberhasilan pencapaian kinerja					
3	Promosi di pemerintah desa ini diberikan atas dasar prestasi kerja yang telah dicapai oleh para pegawai					
4	Pemerintah desa ini dikelola agar pegawainya menyelesaikan tugas pekerjaan dengan baik, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.					
5	Pekerjaan saya di pemerintah desa ini merupakan tugas yang menantang yang harus dicapai dalam waktu tertentu					
6	Saya dapat memaksimalkan kemampuan, pengetahuan					

No.	Gaya Kepemimpinan	SS	S	N	TS	STS
7	Di pemerintah desa ini, relasi antara pimpinan dan bawahan sangat baik dan pimpinan mengakui serta menghargai bawahan					
8	Di pemerintah desa ini, pemimpin memberikan inspirasi kepada bawahan untuk memberikan kontribusi lebih pada pokoknya					
9	Di pemerintah desa ini, pemimpin menentukan tujuan yang realitas untuk instansi					
10	Di pemerintah desa ini, pemimpin memberikan pujian dan penghargaan pada pegawai yang berprestasi					
11	Di pemerintah desa ini, pemimpin menyampaikan dengan jelas tentang tujuan yang diinginkan kepada bawahan					

No.	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	SS	S	N	TS	STS
12	Di pemerintah desa ini telah ada pembagian wewenang dan tanggungjawab					
13	Di pemerintah desa ini telah memiliki kebijakan penilaian resiko (identifikasi resiko) yang ditetapkan secara formal					
14	Di pemerintah desa ini, pencatatan seluruh					

	transaksi berdasarkan sistem keuangan desa					
15	Di pemerintah desa ini, APBDesa yang disahkan oleh kepala desa di musyawarahkan dengan BPD					
16	Di pemerintah desa ini telah memiliki SOP yang memuat pengendalian terkait pengelolaan keuangan desa					

No.	Penegakan Hukum	SS	S	N	TS	STS
17	Di pemerintah desa ini terdapat aturan-aturan hukum yang berlaku					
18	Di pemerintah desa ini seluruh pegawai datang dan pulang tepat waktu					
19	Di pemerintah desa ini, seluruh pegawai bekerja sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing					
20	Di pemerintah desa ini, para pejabat tanggap apabila terjadi pelanggaran peraturan					
21	Di pemerintah desa ini, jika terjadi pelanggaran maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku					
22	Di pemerintah desa ini, seluruh pegawai patuh terhadap peraturan yang berlaku					

No.	Budaya Organisasi	SS	S	N	TS	STS
23	Di pemerintah desa ini (kepala desa, sekretaris desa, bendahara, kepala urusan) bekerja, perilaku atasan yang kurang baik dijadikan panutan bagi pegawai					
24	Di pemerintah desa ini, penerapan kode etik yang menyatakan nilai-nilai organisasi diabaikan oleh pegawai					
25	Di pemerintah desa ini, minimnya penyelenggaraan pelatihan mengenai standar tuntutan organisasi yang tidak diperbolehkan					
26	Di pemerintah desa ini, pemberian sanksi segala perilaku tidak etis yang dilakukan diabaikan					
27	Di pemerintah desa ini, lemahnya mekanisme perlindungan etika					

No.	Perilaku Tidak Etis	SS	S	N	TS	STS
28	Di pemerintah desa ini, suatu hal yang wajar apabila menggunakan kendaraan atau peralatan					

	kantor untuk kepentingan pribadi					
29	Di pemerintah desa ini, suatu hal yang wajar apabila pegawai mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan					
30	Di pemerintah desa ini, suatu hal yang wajar apabila pegawai yang memiliki kedudukan tinggi menyalahgunakan kekuasaan					
31	Di pemerintah desa ini, suatu hal yang wajar apabila pegawai tidak melakukan pekerjaan apapun dimana pegawai tersebut sedang banyak tugas					

No.	Kompetensi	SS	S	N	TS	STS
32	Saya memahami apa yang menjadi tanggungjawab jabatan dalam rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah desa					
33	Di pemerintah desa ini, saya memahami apa yang menjadi visi/misi instansi pemerintah desa					
34	Di pemerintah desa ini, saya memahami proses kerja bidang lain					
35	Di pemerintah desa ini, saya terbiasa bekerja dalam tim					
36	Di pemerintah desa ini, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan dalam permasalahan instansi terutama terkait pengelolaan keuangan desa					
37	Di pemerintah desa ini, saya dituntut untuk memahami permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa					
38	Di pemerintah desa ini, seringkali ada pegawai yang kurang mampu dalam memahami proses kerja berbasis teknologi (komputer)					

No.	Kecenderungan Kecurangan	SS	S	N	TS	STS
39	Di pemerintah desa ini, suatu hal yang wajar apabila pengguna anggaran memasukkan kebutuhan perbaikan bangunan pribadi ke dalam akun belanja					
40	Di pemerintah desa ini, suatu hal yang wajar apabila para pengguna anggaran menggunakan kuitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan					
41	Di pemerintah desa ini, bukan suatu masalah apabila sisa anggaran diambil pimpinan sebagai					

	keuntungan pribadi					
42	Di pemerintah desa ini, kelompok belanja sesuai dengan kebutuhan desa yang tertuang dalam RKPDesa					
43	Di pemerintah desa ini, dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa					



Lampiran 3

STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL PENELITIAN

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	56	21,00	30,00	24,0536	2,16097
X2	56	18,00	25,00	21,4821	1,69482
X3	56	16,00	25,00	21,0000	2,16585
X4	56	19,00	30,00	24,9286	2,27122
X5	56	5,00	15,00	9,2321	2,44942
X6	56	4,00	10,00	7,2321	1,52543
X7	56	24,00	35,00	27,6607	2,67838
Y	56	5,00	13,00	8,3750	1,90275
Valid N (listwise)	56				

Keterangan :

- X1 : Kepuasan Kompensasi
 X2 : Gaya Kepemimpinan
 X3 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
 X4 : Penegakan Hukum
 X5 : Budaya Organisasi
 X6 : Perilaku Tidak Etis
 X7 : Kompwtwnsi
 Y : Kecurangan (*Fraud*)

Lampiran 4

UJI KUALITAS DATA

Uji Validitas

Kepuasan Kompensasi

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,389**	,403**	,392**	,247	,431**	,725**
	Sig. (2-tailed)		,003	,002	,003	,067	,001	,000
	N	56	56	56	56	56	56	56
X1.2	Pearson Correlation	,389**	1	,371**	,206	,156	,302*	,594**
	Sig. (2-tailed)	,003		,005	,127	,250	,023	,000
	N	56	56	56	56	56	56	56
X1.3	Pearson Correlation	,403**	,371**	1	,405**	,092	,481**	,715**
	Sig. (2-tailed)	,002	,005		,002	,501	,000	,000
	N	56	56	56	56	56	56	56
X1.4	Pearson Correlation	,392**	,206	,405**	1	,183	,382**	,624**
	Sig. (2-tailed)	,003	,127	,002		,178	,004	,000
	N	56	56	56	56	56	56	56
X1.5	Pearson Correlation	,247	,156	,092	,183	1	,443**	,534**
	Sig. (2-tailed)	,067	,250	,501	,178		,001	,000
	N	56	56	56	56	56	56	56
X1.6	Pearson Correlation	,431**	,302*	,481**	,382**	,443**	1	,774**
	Sig. (2-tailed)	,001	,023	,000	,004	,001		,000
	N	56	56	56	56	56	56	56
X1	Pearson Correlation	,725**	,594**	,715**	,624**	,534**	,774**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	56	56	56	56	56	56	56

** . Correlation at 0.01(2-tailed):...

* . Correlation at 0.05(2-tailed):...

Gaya Kepemimpinan

Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2
X2.1 Pearson Correlation	1	,561**	,129	,422**	,207	,694**
Sig. (2-tailed)		,000	,342	,001	,126	,000
N	56	56	56	56	56	56
X2.2 Pearson Correlation	,561**	1	,391**	,590**	,266*	,847**
Sig. (2-tailed)	,000		,003	,000	,048	,000
N	56	56	56	56	56	56
X2.3 Pearson Correlation	,129	,391**	1	,231	,209	,568**
Sig. (2-tailed)	,342	,003		,086	,123	,000
N	56	56	56	56	56	56
X2.4 Pearson Correlation	,422**	,590**	,231	1	,384**	,785**
Sig. (2-tailed)	,001	,000	,086		,003	,000
N	56	56	56	56	56	56
X2.5 Pearson Correlation	,207	,266*	,209	,384**	1	,519**
Sig. (2-tailed)	,126	,048	,123	,003		,000
N	56	56	56	56	56	56
X2 Pearson Correlation	,694**	,847**	,568**	,785**	,519**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
N	56	56	56	56	56	56

** . Correlation at 0.01(2-tailed):...

* . Correlation at 0.05(2-tailed):...

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Correlations

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3
X3.1 Pearson Correlation	1	,180	,468**	,416**	,269*	,612**
Sig. (2-tailed)		,185	,000	,001	,045	,000
N	56	56	56	56	56	56
X3.2 Pearson Correlation	,180	1	,264*	,319*	,224	,529**
Sig. (2-tailed)	,185		,049	,017	,097	,000
N	56	56	56	56	56	56
X3.3 Pearson Correlation	,468**	,264*	1	,770**	,613**	,873**
Sig. (2-tailed)	,000	,049		,000	,000	,000
N	56	56	56	56	56	56
X3.4 Pearson Correlation	,416**	,319*	,770**	1	,700**	,882**
Sig. (2-tailed)	,001	,017	,000		,000	,000
N	56	56	56	56	56	56
X3.5 Pearson Correlation	,269*	,224	,613**	,700**	1	,766**
Sig. (2-tailed)	,045	,097	,000	,000		,000
N	56	56	56	56	56	56
X3 Pearson Correlation	,612**	,529**	,873**	,882**	,766**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
N	56	56	56	56	56	56

** . Correlation at 0.01(2-tailed):...

* . Correlation at 0.05(2-tailed):...

Penegakan Hukum

Correlations

	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4
X4.1 Pearson Correlation	1	,217	,278*	,415**	,412**	,520**	,651**
Sig. (2-tailed)		,108	,038	,001	,002	,000	,000
N	56	56	56	56	56	56	56
X4.2 Pearson Correlation	,217	1	,591**	,499**	,244	,362**	,659**
Sig. (2-tailed)	,108		,000	,000	,070	,006	,000
N	56	56	56	56	56	56	56
X4.3 Pearson Correlation	,278*	,591**	1	,687**	,244	,460**	,742**
Sig. (2-tailed)	,038	,000		,000	,070	,000	,000
N	56	56	56	56	56	56	56
X4.4 Pearson Correlation	,415**	,499**	,687**	1	,366**	,467**	,793**
Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,005	,000	,000
N	56	56	56	56	56	56	56
X4.5 Pearson Correlation	,412**	,244	,244	,366**	1	,539**	,675**
Sig. (2-tailed)	,002	,070	,070	,005		,000	,000
N	56	56	56	56	56	56	56
X4.6 Pearson Correlation	,520**	,362**	,460**	,467**	,539**	1	,789**
Sig. (2-tailed)	,000	,006	,000	,000	,000		,000
N	56	56	56	56	56	56	56
X4 Pearson Correlation	,651**	,659**	,742**	,793**	,675**	,789**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	56	56	56	56	56	56	56

*. Correlation at 0.05(2-tailed):...

**. Correlation at 0.01(2-tailed):...

Budaya Organisasi

Correlations

		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5
X5.1	Pearson Correlation	1	,718**	,360**	,682**	,339*	,792**
	Sig. (2-tailed)		,000	,006	,000	,011	,000
	N	56	56	56	56	56	56
X5.2	Pearson Correlation	,718**	1	,298*	,745**	,561**	,861**
	Sig. (2-tailed)	,000		,026	,000	,000	,000
	N	56	56	56	56	56	56
X5.3	Pearson Correlation	,360**	,298*	1	,205	,059	,535**
	Sig. (2-tailed)	,006	,026		,130	,667	,000
	N	56	56	56	56	56	56
X5.4	Pearson Correlation	,682**	,745**	,205	1	,685**	,866**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,130		,000	,000
	N	56	56	56	56	56	56
X5.5	Pearson Correlation	,339*	,561**	,059	,685**	1	,720**
	Sig. (2-tailed)	,011	,000	,667	,000		,000
	N	56	56	56	56	56	56
X5	Pearson Correlation	,792**	,861**	,535**	,866**	,720**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	56	56	56	56	56	56

** . Correlation at 0.01(2-tailed):...

* . Correlation at 0.05(2-tailed):...

Perilaku Tidak Etis**Correlations**

		X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6
X6.1	Pearson Correlation	1	,349**	,337*	,201	,614**
	Sig. (2-tailed)		,008	,011	,138	,000
	N	56	56	56	56	56
X6.2	Pearson Correlation	,349**	1	,530**	,540**	,763**
	Sig. (2-tailed)	,008		,000	,000	,000
	N	56	56	56	56	56
X6.3	Pearson Correlation	,337*	,530**	1	,721**	,860**
	Sig. (2-tailed)	,011	,000		,000	,000
	N	56	56	56	56	56
X6.4	Pearson Correlation	,201	,540**	,721**	1	,819**
	Sig. (2-tailed)	,138	,000	,000		,000
	N	56	56	56	56	56
X6	Pearson Correlation	,614**	,763**	,860**	,819**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	56	56	56	56	56

** . Correlation at 0.01(2-tailed):...

* . Correlation at 0.05(2-tailed):...

Kompetensi**Correlations**

		X7.1	X7.2	X7.3	X7.4	X7.5	X7.6	X7.7	X7
X7.1	Pearson Correlation	1	,838**	,356**	,440**	,591**	,361**	,344**	,772**
	Sig. (2-tailed)		,000	,007	,001	,000	,006	,009	,000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56
X7.2	Pearson Correlation	,838**	1	,461**	,369**	,496**	,212	,273*	,697**

	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,005	,000	,117	,042	,000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56
X7.3	Pearson Correlation	,356*	,461**	1	,147	,237	,306*	,187	,526**
	Sig. (2-tailed)	,007	,000		,280	,079	,022	,168	,000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56
X7.4	Pearson Correlation	,440*	,369**	,147	1	,380**	,309*	,426**	,732**
	Sig. (2-tailed)	,001	,005	,280		,004	,020	,001	,000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56
X7.5	Pearson Correlation	,591*	,496**	,237	,380**	1	,603**	,178	,695**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,079	,004		,000	,190	,000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56
X7.6	Pearson Correlation	,361*	,212	,306*	,309*	,603**	1	,160	,610**
	Sig. (2-tailed)	,006	,117	,022	,020	,000		,240	,000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56
X7.7	Pearson Correlation	,344*	,273*	,187	,426**	,178	,160	1	,630**
	Sig. (2-tailed)	,009	,042	,168	,001	,190	,240		,000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56
X7	Pearson Correlation	,772*	,697**	,526**	,732**	,695**	,610**	,630**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	56	56	56	56	56	56	56	56

** . Correlation at 0.01(2-tailed):...

* . Correlation at 0.05(2-tailed):...

Kecenderungan Kecurangan

Correlations

	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1
Y1.1 Pearson Correlation	1	,731**	,672**	,206	,344**	,858**
Sig. (2-tailed)		,000	,000	,128	,009	,000
N	56	56	56	56	56	56
Y1.2 Pearson Correlation	,731**	1	,564**	,206	,349**	,822**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,127	,008	,000
N	56	56	56	56	56	56
Y1.3 Pearson Correlation	,672**	,564**	1	,257	,216	,791**
Sig. (2-tailed)	,000	,000		,056	,110	,000
N	56	56	56	56	56	56
Y1.4 Pearson Correlation	,206	,206	,257	1	,376**	,505**
Sig. (2-tailed)	,128	,127	,056		,004	,000
N	56	56	56	56	56	56
Y1.5 Pearson Correlation	,344**	,349**	,216	,376**	1	,591**
Sig. 2-tailed)	,009	,008	,110	,004		,000
N	56	56	56	56	56	56
Y1 Pearson Correlation	,858**	,822**	,791**	,505**	,591**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
N	56	56	56	56	56	56

** . Correlation at 0.01(2-tailed):...

Uji Reliabilitas**Kepuasan Kompensasi****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	56	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	56	100,0

a. Listwise deletion based on all variables

Reliability Statistics

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,743	,743	6

Gaya Kepemimpinan**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	56	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	56	100,0

a. Listwise deletion based on all variables

Reliability Statistics

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,725	,719	5

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	56	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	56	100,0

a. Listwise deletion based on all variables

Reliability Statistics

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,791	,785	5

Penegakan Hukum**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	56	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	56	100,0

a. Listwise deletion based on all variables

Reliability Statistics

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,811	,813	6

Budaya Organisasi**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	56	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	56	100,0

a. Listwise deletion based on all variables

Reliability Statistics

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,786	,813	5

Perilaku Tidak Etis

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	56	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	56	100,0

a. Listwise deletion based on all variables

Reliability Statistics

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,760	,763	4

Kompetensi

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	56	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	56	100,0

a. Listwise deletion based on all variables

Reliability Statistics

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,756	,801	7

Kecenderungan Kecuraangan**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	56	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	56	100,0

a. Listwise deletion based on all variables

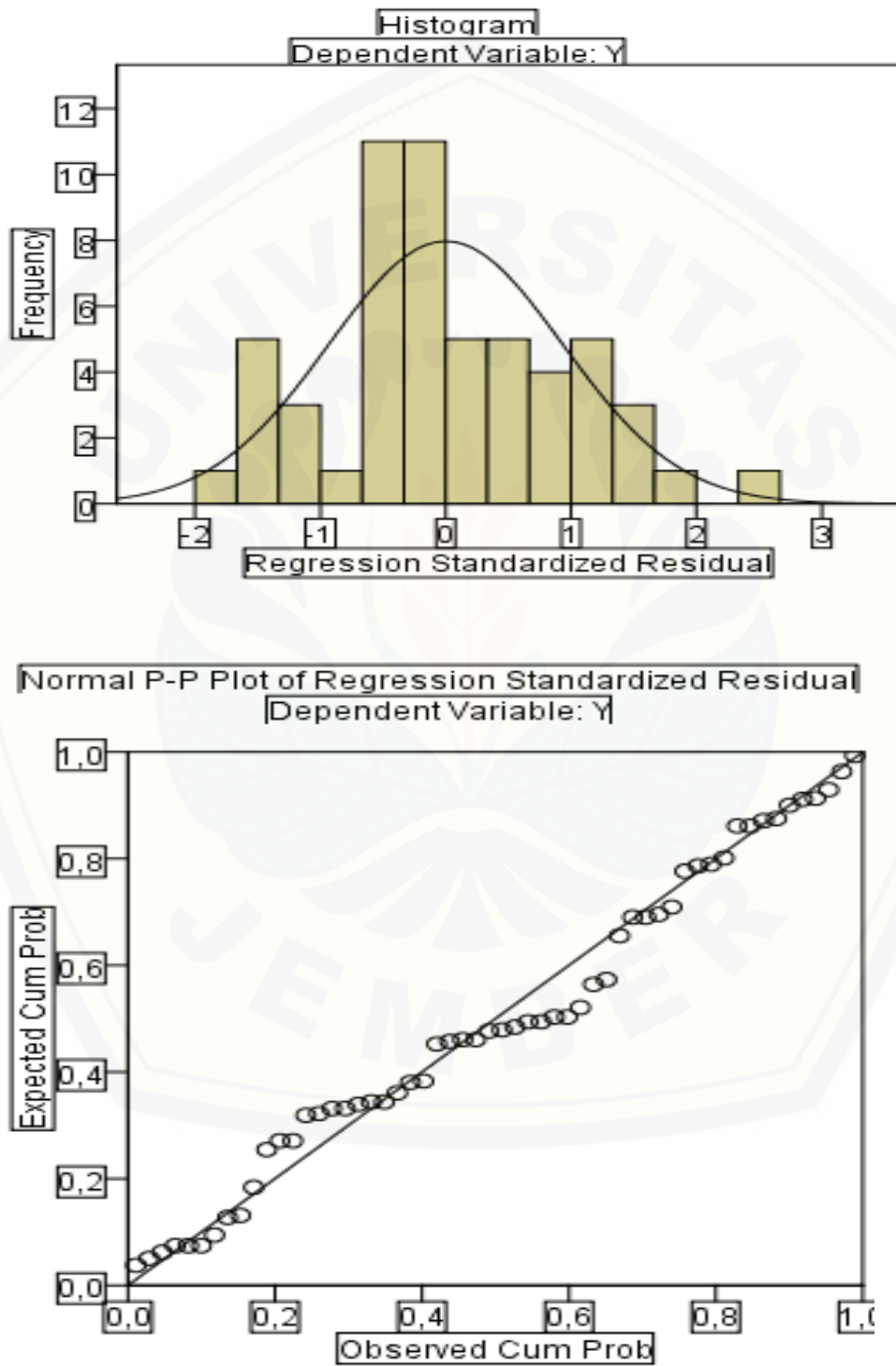
Reliability Statistics

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,775	,763	5

Lampiran 5

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas Data



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,85112849
Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,104
	Negative	-,075
Test Statistic		,104
Asymptotic Significance (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test Distribution is Normal
- b. Calculated from data
- c. Lilliefors Significance Correction
- d. This is a lower bound ...

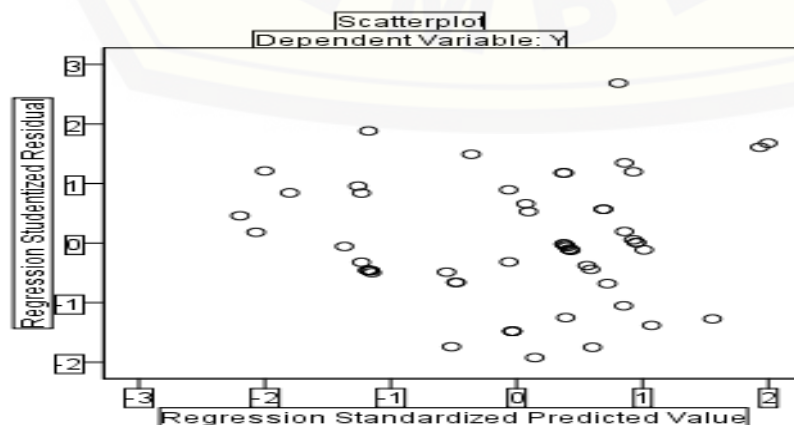
Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients B	Standardized Coefficients Beta	t	Sig	Collinearity Statistics	
					Tolerance	VIF
1 (Constant)	14,552		4,106	,000		
X1	-,144	-,163	-1,536	,131	,368	2,716
X2	,071	,063	,716	,477	,535	1,870
X3	1,037	,001	,001	1,000	,394	2,536
X4	-,209	-,249	-2,205	,032	,327	3,060
X5	,308	,397	3,492	,001	,323	3,095
X6	,200	,161	1,226	,226	,243	4,114
X7	-,120	-,170	-1,842	,072	,492	2,034

a. Dependent Variable: Y

Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 6

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14,552		4,106	,000		
	X1	-,144	-,163	-1,536	,131	,368	2,716
	X2	,071	,063	,716	,477	,535	1,870
	X3	1,037	,001	,001	1,000	,394	2,536
	X4	-,209	-,249	-2,205	,032	,327	3,060
	X5	,308	,397	3,492	,001	,323	3,095
	X6	,200	,161	1,226	,226	,243	4,114
	X7	-,120	-,170	-1,842	,072	,492	2,034

a. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Significance
1	Regression	159,282	7	22,755	2,741	,001 ^b
	Residual	39,843	48	,830		
	Total	199,125	55			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (constant) X7, X2, X5, X1, X3, X4, X6...

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,894 ^a	,800	,771	,91108	1,955

a. Predictors: (constant) X7, X2, X5, X1, X3, X4, X6...

b. Dependent Variable: Y

Lampiran 7

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

Variabel Kepuasan Kompensasi

No.	Pernyataan						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	5	5	4	4	4	4	26
2	4	4	4	4	4	4	24
3	5	5	4	4	4	5	27
4	5	5	4	4	4	5	27
5	4	4	3	4	3	3	21
6	4	4	4	4	3	5	24
7	4	4	3	4	3	3	21
8	4	4	3	4	3	3	21
9	4	4	4	4	4	4	24
10	4	4	4	4	4	4	24
11	5	5	4	5	4	5	28
12	5	4	4	5	4	4	26
13	5	5	5	5	5	5	30
14	4	3	3	4	4	4	22
15	4	4	3	4	4	4	23
16	5	4	4	5	5	5	28
17	4	3	3	4	4	4	22
18	5	5	5	4	4	4	27
19	5	4	4	4	4	4	25
20	5	4	4	5	4	5	27
21	4	4	3	4	4	4	23
22	4	4	3	4	4	4	23
23	4	4	3	4	3	4	22
24	4	3	3	4	5	4	23
25	4	4	3	4	4	4	23
26	4	4	3	4	4	4	23
27	4	4	4	3	4	4	23
28	4	4	3	3	3	4	21
29	5	5	4	5	4	5	28
30	4	4	4	4	3	4	23
31	4	4	5	5	3	4	25
32	4	4	5	5	4	5	27
33	5	4	4	4	4	4	25
34	2	4	3	4	4	4	21

35	4	4	5	4	3	4	24
36	3	4	4	4	4	4	23
37	4	4	4	4	3	4	23
38	5	4	5	5	3	4	26
39	4	4	4	4	4	4	24
40	4	5	4	4	4	4	25
41	4	4	4	4	4	4	24
42	4	5	4	4	4	4	25
43	4	3	4	4	3	4	22
44	4	4	4	4	4	4	24
45	5	4	4	4	4	4	25
46	5	4	4	4	4	5	26
47	4	4	4	4	4	4	24
48	5	4	4	4	4	5	26
49	4	4	4	4	3	5	24
50	4	4	3	4	3	3	21
51	4	4	3	4	3	3	21
52	4	4	3	4	3	3	21
53	4	4	3	4	4	4	23
54	4	4	3	4	4	4	23
55	4	4	4	3	4	4	23
56	4	4	4	4	3	4	23

Variabel Gaya Kepemimpinan

No.	Pernyataan					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	5	4	5	4	4	22
2	5	5	5	5	4	24
3	5	5	5	5	4	24
4	5	5	5	5	4	24
5	5	4	4	4	4	21
6	5	4	4	5	4	22
7	5	4	4	4	4	21
8	5	4	4	4	4	21
9	4	4	4	4	4	20
10	4	5	5	4	4	22
11	5	4	4	4	4	21
12	5	5	4	4	4	22
13	5	5	5	5	5	25
14	5	4	5	5	5	24

15	4	4	4	5	5	22
16	5	5	5	4	5	24
17	4	4	4	4	4	20
18	5	5	4	4	4	22
19	5	5	4	4	4	22
20	5	5	5	5	5	25
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	4	4	4	22
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	4	20
27	4	3	4	3	4	18
28	4	4	4	4	4	20
29	5	4	4	4	4	21
30	4	4	4	5	4	21
31	5	5	4	5	4	23
32	5	5	4	5	5	24
33	5	4	4	4	4	21
34	4	4	4	4	4	20
35	4	3	4	3	4	18
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	5	4	4	21
38	5	5	5	4	4	23
39	4	4	5	4	4	21
40	4	4	5	4	4	21
41	4	4	5	4	4	21
42	4	4	5	4	4	21
43	4	4	5	3	4	20
44	4	4	5	4	4	21
45	5	4	5	4	4	22
46	5	5	5	5	4	24
47	5	5	5	5	4	24
48	5	5	5	5	4	24
49	5	4	4	5	4	22
50	5	4	4	4	4	21
51	5	4	4	4	4	21
52	5	4	4	4	4	21
53	4	4	4	4	4	20
54	4	4	4	4	4	20
55	4	3	4	3	4	18

56	4	4	4	5	4	21
----	---	---	---	---	---	----

Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

No.	Pernyataan					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	5	4	4	5	5	23
2	4	4	3	4	4	19
3	4	3	3	4	4	18
4	4	3	3	4	4	18
5	4	4	4	4	4	20
6	4	5	3	4	4	20
7	4	4	4	4	4	20
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	5	5	5	23
11	5	4	5	5	5	24
12	4	4	4	4	4	20
13	5	5	5	5	3	23
14	5	4	5	5	5	24
15	4	5	4	4	5	22
16	5	5	5	5	5	25
17	4	4	4	4	4	20
18	5	4	5	5	4	23
19	5	5	5	5	5	25
20	5	5	5	5	5	25
21	4	5	4	5	4	22
22	4	3	4	4	4	19
23	4	4	5	5	5	23
24	4	4	3	3	4	18
25	4	3	5	5	5	22
26	4	4	5	5	5	23
27	4	3	3	3	3	16
28	3	4	3	4	4	18
29	5	4	5	5	5	24
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	5	4	4	21
32	4	4	5	5	5	23
33	5	3	5	5	5	23
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	5	4	21
36	4	4	4	5	4	21

37	4	4	4	4	4	20
38	5	4	5	5	4	23
39	5	4	4	4	4	21
40	5	4	4	4	4	21
41	5	4	4	4	4	21
42	5	4	4	4	4	21
43	4	4	4	4	4	20
44	5	4	4	4	4	21
45	5	4	4	5	5	23
46	4	4	3	4	4	19
47	4	4	3	4	4	19
48	4	3	3	4	4	18
49	4	5	3	4	4	20
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	4	20
52	4	4	4	4	4	20
53	4	5	5	5	5	24
54	4	4	5	5	5	23
55	4	3	3	3	3	16
56	4	4	4	4	4	20

Variabel Penegakan Hukum

No.	Pernyataan						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	4	5	5	4	4	4	26
2	4	4	4	4	5	4	25
3	4	4	4	4	5	4	25
4	4	4	4	4	5	4	25
5	4	4	4	4	4	4	24
6	4	3	4	3	4	5	23
7	4	4	4	4	4	4	24
8	4	4	4	4	4	4	24
9	4	4	4	4	4	4	24
10	5	4	4	4	4	4	25
11	5	4	5	5	4	4	27
12	4	4	4	4	4	4	24
13	5	5	5	5	5	5	30
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	4	4	4	4	4	24
16	5	4	5	5	5	5	29

17	4	3	3	3	3	3	19
18	4	4	5	5	5	5	28
19	5	4	4	5	5	5	28
20	5	4	5	5	5	5	29
21	4	3	4	3	4	3	21
22	3	4	4	4	5	4	24
23	5	4	4	4	5	5	27
24	4	3	4	4	4	4	23
25	5	4	4	4	5	5	27
26	5	4	4	4	5	5	27
27	4	3	4	4	4	3	22
28	4	3	3	3	3	3	19
29	5	4	5	5	4	4	27
30	4	4	5	5	4	5	27
31	4	4	4	5	4	4	25
32	4	4	5	4	5	4	26
33	5	4	4	4	5	4	26
34	4	4	4	4	3	4	23
35	4	5	5	4	3	4	25
36	4	4	4	3	4	4	23
37	4	4	4	4	4	4	24
38	5	5	5	5	5	5	30
39	4	4	4	4	4	4	24
40	4	4	4	4	4	4	24
41	4	4	4	4	4	4	24
42	4	4	4	4	4	4	24
43	4	4	4	4	4	4	24
44	4	4	4	4	4	4	24
45	4	5	5	4	4	4	26
46	4	4	4	4	5	4	25
47	4	4	4	4	5	4	25
48	4	4	4	4	5	4	25
49	4	3	4	3	4	5	23
50	4	4	4	4	4	4	24
51	4	4	4	4	4	4	24
52	4	4	4	4	4	4	24
53	5	4	4	4	5	5	27
54	5	4	4	4	5	5	27
55	4	3	4	4	4	3	22
56	4	4	5	5	4	5	27

Variabel Budaya Organisasi

No.	Pernyataan					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	1	1	2	2	2	8
2	2	2	3	2	2	11
3	2	2	3	2	2	11
4	2	2	3	2	2	11
5	2	2	3	2	2	11
6	1	2	3	2	2	10
7	2	2	3	2	2	11
8	2	2	3	2	2	11
9	2	2	2	2	1	9
10	1	2	2	1	1	7
11	2	2	3	2	1	10
12	2	3	1	2	3	11
13	1	1	3	1	1	7
14	2	2	3	2	2	11
15	2	2	3	2	2	11
16	1	1	2	1	1	6
17	2	2	3	2	2	11
18	1	2	1	1	2	7
19	1	1	2	1	1	6
20	1	1	1	1	1	5
21	3	3	3	3	3	15
22	1	2	3	2	2	10
23	1	1	1	1	1	5
24	3	2	2	3	3	13
25	1	1	1	1	1	5
26	1	1	1	1	1	5
27	2	2	2	2	3	11
28	2	3	2	3	3	13
29	2	2	3	2	1	10
30	1	2	1	3	4	11
31	2	2	2	2	1	9
32	1	2	3	1	3	10
33	1	1	1	1	1	5
34	2	3	3	2	2	12
35	2	2	2	2	3	11
36	2	2	2	2	3	11
37	2	2	2	2	2	10

38	1	1	2	1	2	7
39	1	1	3	1	2	8
40	1	1	2	1	1	6
41	1	1	3	1	2	8
42	1	1	2	1	1	6
43	2	2	2	2	2	10
44	1	1	3	1	2	8
45	1	1	2	2	2	8
46	2	2	2	2	2	10
47	2	2	2	2	2	10
48	2	2	2	2	2	10
49	1	2	3	2	2	10
50	2	2	3	2	2	11
51	2	2	3	2	2	11
52	2	2	3	2	2	11
53	1	1	1	1	1	5
54	1	1	1	1	1	5
55	2	2	2	2	3	11
56	1	2	1	3	4	11

Variabel Perilaku Tidak Etis

No.	Pernyataan				Jumlah
	1	2	3	4	
1	2	2	2	2	8
2	2	2	2	2	8
3	2	2	2	2	8
4	2	2	2	2	8
5	2	2	2	2	8
6	2	2	1	1	6
7	3	2	2	2	9
8	3	2	2	2	9
9	2	2	2	2	8
10	2	2	1	1	6
11	2	1	1	1	5
12	2	2	2	2	8
13	1	1	1	1	4
14	2	2	2	2	8
15	2	2	2	2	8
16	1	1	1	1	4
17	3	2	2	2	9

18	1	2	1	2	6
19	2	1	1	1	5
20	1	1	1	1	4
21	3	3	2	2	10
22	1	3	3	3	10
23	2	2	1	1	6
24	2	2	2	2	8
25	2	2	1	1	6
26	2	2	1	1	6
27	2	2	2	2	8
28	3	2	2	2	9
29	2	1	1	1	5
30	2	2	2	3	9
31	2	2	1	2	7
32	2	1	1	2	6
33	1	1	1	1	4
34	2	2	2	2	8
35	2	2	1	1	6
36	2	2	2	2	8
37	2	2	2	2	8
38	1	2	1	2	6
39	2	2	1	2	7
40	2	2	1	2	7
41	2	2	1	2	7
42	2	2	1	2	7
43	2	2	2	2	8
44	2	2	1	2	7
45	2	2	2	2	8
46	2	2	2	2	8
47	2	2	2	2	8
48	2	2	2	2	8
49	2	2	1	1	6
50	2	2	2	2	8
51	3	2	2	2	9
52	3	2	2	2	9
53	2	2	1	1	6
54	2	2	1	1	6
55	2	2	2	2	8
56	2	2	2	3	9

38	5	4	4	4	4	4	4	29
39	4	4	4	4	4	4	2	26
40	4	4	4	4	4	4	2	26
41	4	4	4	4	4	4	2	26
42	4	4	4	4	4	4	2	26
43	4	4	4	4	4	4	4	28
44	4	4	4	4	4	4	2	26
45	4	4	4	2	4	4	2	24
46	4	4	4	2	4	4	2	24
47	4	4	4	2	4	4	2	24
48	4	4	4	2	4	4	2	24
49	4	4	3	4	4	4	3	26
50	4	4	3	4	4	3	3	25
51	4	4	4	4	4	4	4	28
52	4	4	4	4	4	4	3	27
53	4	4	4	5	4	4	4	29
54	4	4	4	5	4	4	4	29
55	4	4	4	4	4	4	4	28
56	4	4	4	3	4	4	4	27

Variabel Kecenderungan Kecurangan

No.	Pernyataan					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	2	2	1	2	2	9
2	2	2	1	2	2	9
3	2	2	1	2	2	9
4	2	2	1	2	2	9
5	2	2	2	2	2	10
6	2	2	2	2	2	10
7	2	2	2	2	2	10
8	2	2	2	2	2	10
9	2	2	2	1	1	8
10	1	1	1	2	2	7
11	1	1	1	2	1	6
12	2	2	1	1	1	7
13	1	1	1	1	1	5
14	2	1	2	2	2	9
15	2	1	2	2	2	9
16	1	1	1	2	1	6
17	2	2	2	2	2	10

18	1	2	1	2	2	8
19	1	1	1	1	2	6
20	1	1	1	1	1	5
21	3	2	3	3	2	13
22	3	3	3	2	1	12
23	1	1	1	2	1	6
24	2	2	2	2	2	10
25	1	1	1	2	1	6
26	1	1	1	2	1	6
27	2	2	2	2	2	10
28	3	3	3	2	2	13
29	1	1	1	2	1	6
30	2	1	1	2	2	8
31	2	1	2	2	2	9
32	1	1	1	2	1	6
33	1	1	1	2	2	7
34	2	2	1	2	2	9
35	1	2	2	2	2	9
36	1	2	1	3	2	9
37	2	2	1	2	2	9
38	1	1	1	2	1	6
39	1	1	1	2	2	7
40	1	1	1	2	2	7
41	1	1	1	2	2	7
42	1	1	1	2	2	7
43	2	2	1	2	2	9
44	1	1	1	2	2	7
45	2	2	1	2	2	9
46	2	2	1	2	2	9
47	2	2	1	2	2	9
48	2	2	1	2	2	9
49	2	2	2	2	2	10
50	2	2	2	2	2	10
51	2	2	2	3	2	11
52	2	2	2	3	2	11
53	1	1	1	2	1	6
54	2	1	1	2	1	7
55	2	2	2	2	2	10
56	2	1	1	2	2	8